

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
STATUS ANAK DALAM PERKAWINAN YANG DIBATALKAN
KARENA WALI PALSU**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

HASTI ANI

NPM:1421010031

Jurusan:Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1439 H/ 2018 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
STATUS ANAK DALAM PERKAWINAN YANG DIBATALKAN
KARENA WALI PALSU**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

HASTI ANI

NPM:1421010031

Jurusan:Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Pembimbing I: Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing II: Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

1439 H/ 2018 M

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP STATUS ANAK DALAM PERKAWINAN YANG DIBATALKAN KARENA WALI PALSU

Oleh

Hasti Ani

Pembatalan perkawinan disebut dengan fasakh dalam hukum Islam yaitu bisa terjadi karena rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama. Pembatalan perkawinan menurut hukum Positif adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah. UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatatan perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri. Pembatalan perkawinan ini terdapat akibat hukumnya yaitu status anak.

Permasalahan yang di amati dalam penelitian ini adalah “Bagaimana konsep status anak dalam perkawinan yang dibatalkan karena wali palsu. Persamaan dan perbedaan status anak dalam perkawinan yang dibatalkan ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif”.

Tujuan penulisan ini, untuk mengetahui status anak dari perkawinan yang dibatalkan karena wali palsu yang ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif. Adapun kegunaan penulisan skripsi ini adalah diharapkan dapat menjadi bahan informasi kajian akademis dan diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi bagi penelitian berikutnya.

Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan yang mana data-data diambil dari kitab-kitab, buku-buku, dokumen-dokumen dan lain-lain yang berkaitan dengan perundangan tersebut. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara: Pemeriksaan data (*editing*), pendataan data (*coding*), rekonstruksi (*Reconstructing*), dan sistematis data (*sistemaizing*). Adapun dalam menganalisis data dengan menggunakan metode berfikir kualitatif dan dalam menarik kesimpulan dengan menggunakan pendekatan deduktif.

Hasil dari penelitian ini, yaitu status anak dalam perkawinan yang dibatalkan karena wali palsu ini menurut Imam Syafi'i tidak sah karena, wanita tidak boleh menikah kecuai dengan izin walinya, atau orang cerdik dari kalangan keluarganya atau penguasa. Akibat nya pernikahan ini dianggap tidak sah dan pertalian nasab hanya kepada ibu. Berbeda dengan hukum positif yaitu dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 28 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung telp. (0721)703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan secukupnya maka skripsi saudara :

Nama : Hasti Ani

NPM : 1421010031

Prodi Studi : Ahwal Al-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah

Judulskripsi : **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Status Anak dalam Perkawinan yang dibatalkan karena Wali Palsu**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 09 April 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Gandhi Livorba Indra, S.Ag., M.Ag.

Abdul Oodir Zaelani, S.H.I., M.A.

NIP. 197504282007101003

NIP.198206282009011015

Ketua Jurusan

Ahwal Al-Syakhsiyyah

Marwin, S.H., M.H.

NIP. 197501292000031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP STATUS ANAK DALAM PERKAWINAN YANG DIBATALKAN KARENA WALI PALSU"**, disusun oleh : Hasti Ani NPM : 1421010031, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah, telah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal: Rabu, 18 April 2018.

TEAM DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Drs. H. Khoirul Abror, M.H.

Sekretaris : Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.

Penguji 1 : Dr. Jayusman, M.Ag.

Penguji 2 : Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.

Dekan,

Fakultas Syari'ah

Dr. Khamisyah, S.Ag., M.Ag.

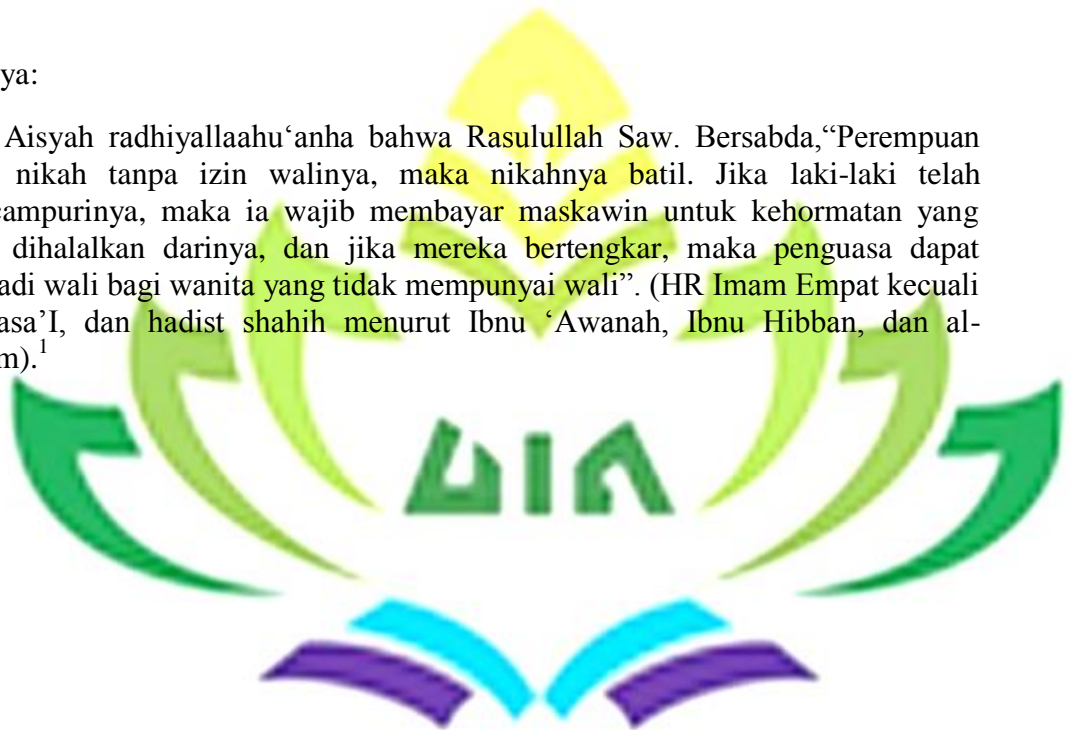
NIP: 197009011997031002

MOTTO

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجَرُوا فَالْأَسْلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ (أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ)

Artinya:

Dari Aisyah radhiyallaahu‘anha bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, “Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jika laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika mereka bertengkar, maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali”. (HR Imam Empat kecuali an-Nasa’I, dan hadist shahih menurut Ibnu ‘Awanah, Ibnu Hibban, dan al-Hakim).¹

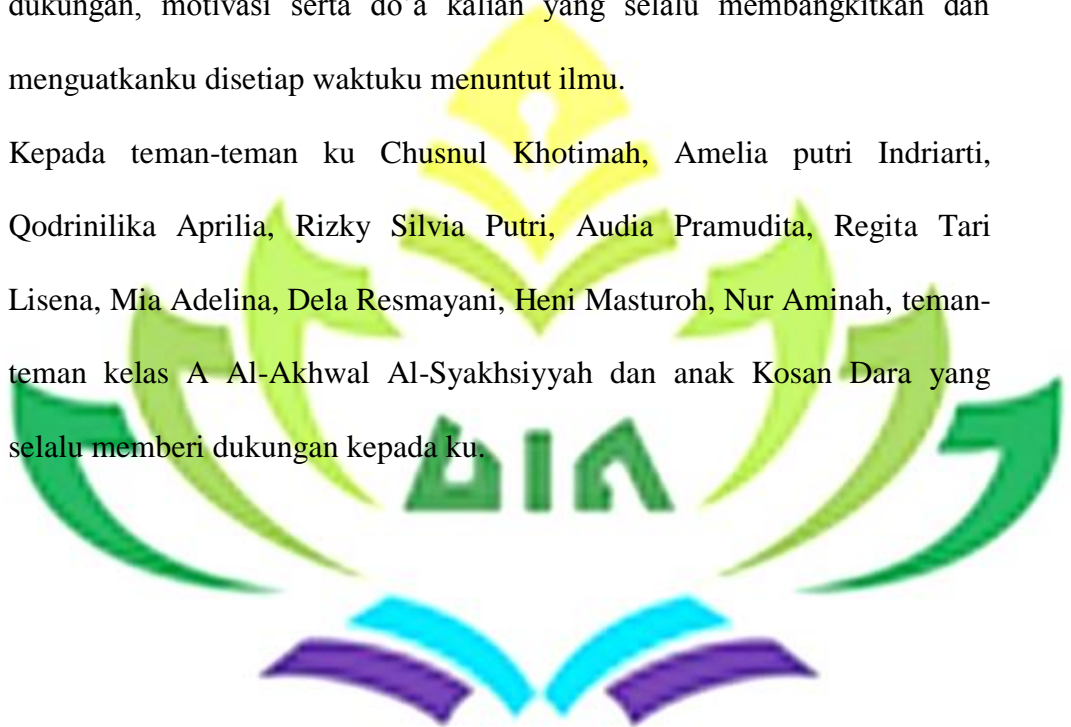


¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh, Khalifaturrahman, Haer Haeruddin dengan judul *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum* (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 431.

PERSEMBAHAN

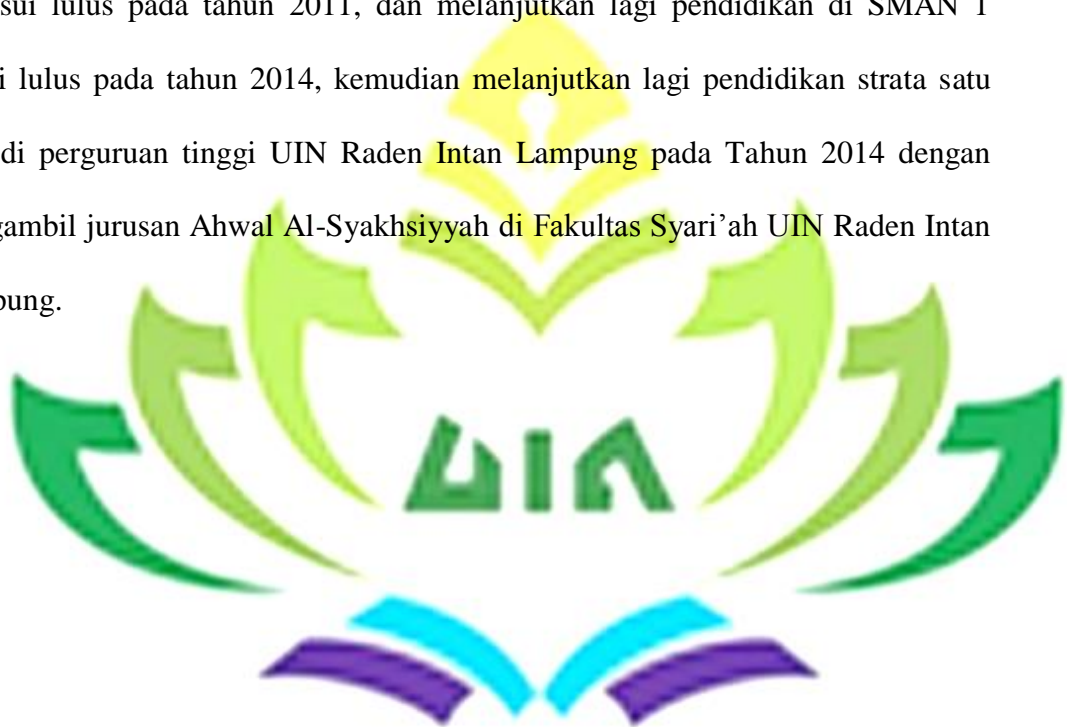
Skripsi ini saya persembahkan dan dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak H. Hasanuddin dan Ibu Hj. Asmawati dan kakak-kakak saya, terimakasih atas cinta, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, motivasi serta do'a kalian yang selalu membangkitkan dan menguatkan ku disetiap waktu ku menuntut ilmu.
2. Kepada teman-teman ku Chusnul Khotimah, Amelia putri Indriarti, Qodrinilika Aprilia, Rizky Silvia Putri, Audia Pramudita, Regita Tari Lisena, Mia Adelina, Dela Resmayani, Heni Masturoh, Nur Aminah, teman-teman kelas A Al-Akhwil Al-Syakhsiyyah dan anak Kosan Dara yang selalu memberi dukungan kepada ku.



RIWAYAT HIDUP

Hasti Ani adalah anak ke tujuh dari tujuh bersaudara, putri dari pasangan Bapak H. Hasanuddin dan Ibu Hj. Asmawati yang berasal dari desa Bangunan Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan. Menempuh pendidikan pertama di SDN 2 Kasui Pasar dan lulus pada tahun 2008, melanjutkan pendidikan di MTS N 1 Kasui lulus pada tahun 2011, dan melanjutkan lagi pendidikan di SMAN 1 Kasui lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan lagi pendidikan strata satu (S1) di perguruan tinggi UIN Raden Intan Lampung pada Tahun 2014 dengan mengambil jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk dan kesehatan, sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Status Anak dalam Perkawinan yang Dibatalkan karena Wali Palsu)” ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dan persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program Strata satu (S1) di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Atas terselesaikannya skripsi ini tak lupa mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag selaku dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap masalah-masalah akademik mahasiswa.
3. Bapak Marwin, S.H., M.H selaku ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung sekaligus Pembimbing II yang membimbing selama masa studi.

4. Bapak Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan bapak Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan kritik, saran dan arahan hingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
5. Tim penguji, bapak Drs. H. Khoirul Abror, M.H. selaku ketua sidang, bapak Hervin Yoki Pradikta, S.H.I., M.H.I. selaku sekretaris, bapak Dr. Jayusman, M.Ag. selaku Penguji I dan bapak Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. selaku penguji II.
6. Keluarga besar Ahwal Al-Syakhsiyyah Kelas A angkatan 2014.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan waktu, dana, kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi hasil penelitian ini.

Penulis berharap hasil penelitian tersebut akan menjadi sambungan yang berarti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke Islaman di abad modern ini.

Bandar Lampung, 22 Februari 2018

Penulis,

HASTI ANI
NPM. 1421010031

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER DALAM.....	I
ABSTRAK	II
PERSETUJUAN	III
PENGESAHAN	IV
MOTTO	V
PERSEMBAHAN	VI
RIWAYAT HIDUP	VII
KATA PENGANTAR	VIII
DAFTAR ISI	X
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
F. Metode Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perkawinan	
1. Pengertian Perkawinan menurut Hukum Islam.....	13
2. Pengertian Perkawinan menurut Hukum Positif.....	20
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	21
4. Syarat Sahnya Perkawinan.....	30
B. Batalnya Perkawinan.....	
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Positif.....	33
2. Pengertian Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	38
3. Syarat dan Cara Pembatalan.....	40
4. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan.....	42
C. Wali.....	
1. Pengertian Wali.....	44
2. Pandangan Ulama Mazhab Tentang Wali.....	50
3. Macam-Macam Wali Nikah.....	60
D. Nasab.....	
1. Pengertian Nasab.....	69
2. Anak Sah dan Akibat Hukumnya.....	71
3. Anak Tidak Sah dan Akibat Hukumnya.....	73
BAB III WALI PALSU	
A. Pengertian Wali Palsu.....	75

B. Contoh-Contoh Kasus Wali Palsu.....	76
C. Akibat Perkawinan Wali Palsu.....	79
BAB IV ANALISIS	
A. Konsep Status Anak dalam Perkawinan yang Dibatalkan karena Wali Palsu.....	81
B. Persamaan dan Perbedaan Status Anak dalam Perkawinan yang Dibatalkan di Tinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif.....	82
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman, maka penulis akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Status Anak dalam Perkawinan yang Dibatalkan karena Wali Palsu”** sebagai berikut:

- Tinjauan dalam kamus bahasa Indonesia berasal dari kata Tinjau yang berarti hasil meninjau, pandangan, pendapat.²
- Hukum Islam adalah hukum mengenai norma-norma agama Islam yang mengatur kehidupan manusia.³ Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, hukum syara'.⁴
- Hukum positif adalah salah satu bagian hukum, ditinjau menurut waktu berlakunya. Hukum positif atau bisa dikenal dengan istilah ius constitutum, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat

² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 189.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 67.

⁴ Ibid, h. 501.

tertentu dalam suatu daerah tertentu. Singkatnya hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat pada suatu waktu, dalam suatu tempat tertentu.⁵

- Status anak dalam hukum Islam, nasab menjadi sebuah masalah yang sangat penting dan dikaji dalam kaitannya terhadap masalah pernikahan, kewajiban memberi nafkah, kewarisan, perwalian hubungan ke mahraman, dan lain-lain. Nasab atau hubungan kekerabatan antara seorang anak dan ayah hanya dapat terbentuk melalui tiga cara, yaitu melalui pernikahan yang sah, pernikahan yang fasid, dan melalui hubungan badan secara syubhat.⁶
- Batalnya perkawinan adalah rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama. Seperti dalam Pasal 26 perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatatan perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri 2 orang saksi dapat diminta pembatalannya oleh pihak keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami istri, jaksa, dan suami atau istri.⁷
- Wali palsu adalah wali yang di pakai oleh seseorang tetapi bukan wali yang sebenarnya sama halnya dengan wali yang tidak sah untuk

⁵ Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: PT Bima Ilmu, 2001), h. 21.

⁶ Ma'ruf Amin, Nasaruddin Umar, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Amzah, 2013), h. 116.

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 121.

melakukan rukun nikah. Kompilasi hukum Islam pada Pasal 20 dinyatakan bahwa, bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, *akil* dan *balig* dan wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.⁸

Berdasarkan penjelasan-penjelasan istilah tersebut dapat di simpulkan, bahwa yang dimaksud oleh judul ini adalah sebuah penelitian mengenai bagaimana status anak dari batalnya perkawinan karena wali palsu menurut hukum Islam dan hukum positif.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi penulis untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian, di antaranya sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

- a. Masa modern saat ini masih ada yang belum mengerti pentingnya izin orang tua dalam melakukan perkawinan, sehingga menggunakan wali yang bukan haknya. Padahal ini sangat berpengaruh terhadap sah tidaknya pernikahan tersebut.
- b. Perkawinan yang tidak sah ini terdapat akibat hukum yaitu dalam status anak

2. Alasan Subjektif

- a. Pokok bahasan skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.
- b. Tersedianya literatur yang menunjang penelitian.

⁸ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2004), h. 72.

C. Latar Belakang Masalah

Islam menganjurkan orang berkeluarga karena dari segi batin orang dapat mencapai melalui berkeluarga yang baik dan sangat menunjang untuk menuju kepada kesejahteraan termasuk dalam mencapai rezeki tuhan. Dan di dalam Al-Qur'an pun dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah. termasuk manusia sebagaimana firman-Nya dalam Az-Zariyat ayat 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Dalam pernikahan tidak semua berjalan dengan mulus banyak persyaratan dan rukun-rukun yang harus diikuti. Arti rukun sendiri adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan tersebut, syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Arti sah adalah sesuatu pekerjaan yang memenuhi rukun dan syarat. Rukun perwalian itu terdiri atas, Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan, adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, adanya dua orang saksi sighat akad nikah yaitu ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan di jawab oleh calon pengantin laki-laki.⁹

⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 46.

Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 menurut hukum positif adalah menegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila kita tidak mengikuti syarat dan rukun perkawinan maka perkawinan itu dapat dibatalkan.

Dalam mengemukakan jenis perkawinan yang dapat dibatalkan kompilasi lebih sistematis dari pada Undang-undang perkawinan Pasal 70 dan 71 KHI mengatur masalah ini, sementara dalam undang-undang perkawinan, diatur dalam Pasal 22, 24, 26 Pasal 23 mengatur tentang pihak yang dapat mengajukan pembatalan, dan Pasal 25 tentang tempat dimana upaya hukum pembatalan tersebut diajukan seperti dalam Pasal 26 ayat 1, perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatatan perkawinan yang tidak berwenang, wali yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi. Dan mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada dibawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyatanya mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Dan seperti yang dijelaskan di atas bahwa perwalian palsu itu tidak sah, di mana wali itu sangat penting dalam rukun perkawinan, apalagi perkawinan itu dilangsungkan oleh pihak wali mempelai perempuan atau

wakilnya dengan calon suami atau wakilnya dan sekarang banyak orang yang ingin mempercepat perkawinannya dengan cara memalsukan identitas seperti memalsukan wali nikahnya sendiri. Alasannya pun beragam ada yang karna tidak direstui oleh orang tuanya sehingga ia memalsukan wali nikahnya dengan memakai nama ayahnya tetapi orang yang lain yang menikahkannya.¹⁰

Orang yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan menurut Pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, yaitu para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, suami atau istri, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan, dan pejabat yang ditunjuk tersebut Pasal 16 ayat (2) Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.¹¹

Status anak yang lahir dari akibat perkawinan yang dibatalkan tersebut mereka tetap memiliki hubungan hukum dengan ibu dan bapaknya Pasal 76 Kompilasi menyatakan “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”, penetapan hukum ini didasarkan pada metode *al-istishhab al-ashl* atau *baraah al-ashliyah*, yang menggunakan kaidah “hukum sesuatu yang telah berlangsung ditetapkan bagaimana asalnya”.¹²

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Op. Cit.* h. 121.

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 39.

¹² Ahmad Rofiq, *Op. Cit.* h. 125.

Dalam Undang-undang No 1/1974 Pasal 28 ayat (2) dinyatakan: keputusan tidak berlaku surut terhadap Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, Suami atau istri yang beritikad dengan beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan adanya perkawinan lain yang lebih dahulu, Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam huruf a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedang menurut KHI seperti yang terdapat pada Pasal 75 dan 76 dijelaskan, keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu dari suami istri murtad, Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹³

Dari banyak syarat-syarat dan rukun-rukun untuk sahnya perkawinan (nikah) menurut hukum Islam, wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan, bahkan menurut Syafi'i tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan, sedangkan bagi calon pengantin laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk sahnya nikah tersebut. Apabila wanita itu telah disetubuhi, maka bagi wanita yang tidak pakai wali itu, wajib dibayarkan kepadanya "mahar mitsil" dengan mahar itu dianggap halal melakukan hubungan seksual dengannya. Tidaklah wanita menikahkan wanita dan

¹³ Amiur Nurudddin, Azhari Akmal Tarigan, *Op. Cit.* h. 113.

tidaklah wanita menikahkan dirinya sendiri, bahwa wanita yang menikahkan dirinya sendiri adalah wanita pezina.¹⁴

Namun nyatanya telah terjadi pembatalan perkawinan karena wali palsu. Bahwa tanggal 24 juli 2011, Termohon I dan Termohon II telah melakukan pernikahan, di dalam buku nikah tersebut di cantumkan wali nikah adalah Pemohon sebagai orang tua kandung dari Termohon II, sementara Pemohon tidak pernah menikahkan Termohon II dan tidak pernah mengetahui atau di beri tahu mengenai pernikahan antara Termohon I dan Termohon II. Dari pernikahan tersebut pada tanggal 3 Agustus 2012 telah dilahirkan seorang anak yang bernama Nabila. Pemohon baru mengetahui adanya pernikahan tersebut pada tanggal 15 Agustus 2012, Karena itu Pemohon ingin sekali membatalkan pernikahan Termohon I dan Termohon II, karena telah membuat pemalsuan identitas data mengenai wali nikah dan telah melanggar Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Permintaan Pemohon dikabulkan dengan membatalkan pernikahan Termohon I dan Termohon II dengan Nomor: 1322/Pdt.G/2012/PA.Plg. Berdasarkan putusan tersebut terdapat kasus pembatalan perkawinan karena wali palsu, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Status Anak dalam Perkawinan yang Dibatalkan karena Wali Palsu”.¹⁵

¹⁴Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h. 217.

¹⁵ <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/> (10Desember 2017).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas tersebut, beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep status anak dalam perkawinan yang dibatalkan karena wali palsu?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan status anak dalam perkawinan yang dibatalkan ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap status anak dari batalnya perkawinan karena wali palsu
- b. Untuk mengetahui siapa saja pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan tersebut

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah untuk mengembangkan kajian hukum Islam dan hukum positif secara umum untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah /Hukum, maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan fiqh Islam.
- b. Sebagai tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam, pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kepustakaan yaitu data primernya merupakan data pustaka. Dengan cara melalui buku-buku umum maupun agama, Makalah dan tulisan-tulisan lainnya yang relevan. Berdasarkan literature, karena dalam kajian ini hanya terfokus pada dataran konsep, sehingga library merupakan metode yang penulis terapkan dalam pengumpulan data.¹⁶

b. Sifat Penelitian

Adapun penelitian ini adalah deskriptif yaitu: Pada umumnya dipergunakan dalam menguraikan sejarah, mengutip atau menjelaskan bunyi peraturan perundang-undangan dan dalam uraian umum. sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan dan perilaku mereka yang diamati.¹⁷

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan dalam hal yang bersumber dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan kitab fiqh.

¹⁶ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), h. 3.

¹⁷ Ibid, h. 4.

- b. Data sekunder yaitu buku-buku yang berkaitan dengan munakahat seperti kitab-kitab fikih klasik, fiqh munakahat, nasab dan status anak dalam hukum Islam, Hukum perdata Islam di Indonesia, hukum perkawinan islam, serta literature lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis saat ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kepastakaan yaitu dengan cara melalui buku-buku, umum maupun agama, berbagai peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan beberapa macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan.¹⁸

4. Metode Pengelolaan data

Dari data yang sudah terkumpul kemudian diolah kembali. Dalam pengolahan data ini, penulis lakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah yang dikaji oleh penulis. Dalam hal ini penulis mengecek kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka dokumen apakah sudah lengkap dan relevan, dan tidak berlebihan dalam kesalahan.
- b. Penandaan data (*coding*), Yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (kitab-kitab, buku literature, atau dokumen) pemegang hak cipta. Dalam hal ini penulis mengklasifikasikan data sesuai

¹⁸ Ibid, h. 3.

dengan masing-masing pokok bahasan dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna dan untuk memudahkan analisa data.

- c. Rekontruksi data (*reconstructing*), Yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan di interprestasikan.
- d. Sistematisasi data (*systematizing*), Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁹

5. Metode Analisis Data

Untuk menganalisi data penulis akan melakukan analisa secara kualitatif. Bentuk analisis ini dilakukan dengan penjelasan-penjelasan, bukan berupa bentuk angka-angka statistic atau angka lainnya. Metode yang digunakan dalam menganalisa data ini menggunakan metode deduktif yaitu “suatu penelitian dimana orang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum, dengan bertitik tolak dari pengetahuan yang umum itu, kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus.”²⁰ Kaitan dengan skripsi ini adalah, metode deduktif ini digunakan pada saat mengumpulkan data dari perpustakaan secara umum, dari status anak dari batalnya perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam, tentang suatu konsep, teori ataupun pendapat tentang perbedaan atau persamaan hukum yang terkait dengannya, kemudian di ambil kesimpulan secara khusus sampai pada suatu titik temu kebenaran dan kepastian yang ada.

¹⁹ AbdulKadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, 2004), h. 126.

²⁰ Ibid, h. 41.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*.²¹ Kata “nikah ” berasal dari bahasa arab نكح yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja نكح . Sinonimnya تزوج kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, secara sosial, kata pernikahan dipergunakan dalam berbagai upacara perkawinan. Di samping itu, kata “pernikahan” tampak lebih etis dan agamis dibandingkan dengan kata “perkawinan”. Kata “perkawinan” lebih cocok untuk makhluk selain manusia.

Dalam kitab-kitab fikih, pembahasan pernikahan dimasukkan dalam suatu bab yang disebut dengan *munākahat*. Menurut bahasa, kata “nikah” berarti *adh-dhammu wattadākhul* (bertindih dan memasukkan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *adh-dhammu wa al-jam’u* (bertindih dan berkumpul). Oleh karena itu, menurut kebiasaan Arab, pergesekan rumpun pohon seperti bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan *tanākahatil asyjār* (rumpun pohon itu sedang kawin), karena

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 9.

tiupan angin itu menyebabkan terjadinya pergesakkan dan masuknya rumpun yang satu keruang yang lain.²²

Menurut istilah ilmu fikih, *nikah* berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafazh “*nikāh*” atau “*tazwīj*”. Nikah atau *jimā’*, sesuai dengan makna linguistiknya, berasal dari kata “*al-wath*”, yaitu bersetubuh atau bersenggama. Nikah adalah akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafazh “*an-nikāh*” atau “*at-tazwīj*”, artinya bersetubuh, dengan pengertian menikahi perempuan makna hakikatnya menggauli istri dan kata “*munākahat*” diartikan saling menggauli.²³

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miisāqan ghalīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Jadi perkawinan dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Perkawinan dalam arti sempit yaitu akad yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan. Sedangkan perkawinan dalam arti luas yaitu akad atau ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*.²⁴

²² *Ibid*, h. 10.

²³ *Ibid*. h. 11.

²⁴ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2015), h. 41.

Pengertian perkawinan menurut Hukum Adat, pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan berarti sebagai “perikatan perdata” tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan”. Terjadinya perikatan perkawinan bukan saja semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan kekeluargaan, kekerabatan, serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan dengan manusia dan tuhan (ibadah) maupun hubungan sesama manusia (mu’amalah) dalam pergaulan hidup agar selamanya dunia dan akhirat.²⁵

Hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan erat dengan akibat dari perkawinan tersebut. Di dalam Al-Qur’an telah mensinyalir, Pengaturan manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam aturan-aturan tersendiri. Sebagaimana firman Allah SWT. QS. An-Nisa’ (4): 1

²⁵*Ibid.* h. 42.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ أَوْتَقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۚ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٦﴾

Artinya: ”Wahai manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan (mempergunakan) namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan (silaturahmi). Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasinya”.²⁶

Perkawinan dapat dilihat dari tiga segi pandangan yaitu dari segi hukum, segi sosial, dan segi agama. Dilihat dari segi hukum perkawinan merupakan suatu perjanjian oleh Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 21²⁷

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”.²⁸

Disebut dengan kata-kata “*mitsāqhan ghalīẓhan*”. Dapat juga dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya cara mengadakan ikatan perkawinan

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Diponogoro: Al-Aliy, 2005), h. 61.

²⁷ Khoirul Abror, *Op. Cit.* h. 64.

²⁸ Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 64.

telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan rukun atau syarat tertentu, dan cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan *fasakh*, *syiqāq*, dan sebagainya.²⁹

Perjanjian dalam perkawinan ini mempunyai tiga karakter yang khusus yaitu, perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak, kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya, dan persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.³⁰

Dari segi sosial ditemui suatu penilaian yang umum ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin. Dan dari segi agama suatu perkawinan itu sangat penting. Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.³¹

Ikatan perkawinan yang dilakukan dengan jalan akad nikah seperti yang telah diatur oleh Islam adalah suatu ikatan atau suatu janji yang kuat.

Kalau diperhatikan ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan soal

²⁹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 5.

³⁰ Mohd. Idris Ramulyo, *Op. Cit.* h. 17.

³¹ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 44

perkawinan, misalnya surat Ar-Rum ayat 21 dan surat An-Nisa ayat 3, dapat dipahami bahwa definisi-definisi yang diberikan oleh keempat Imam Madzhab dan Fukaha lainnya belum dapat menggambarkan nilai-nilai ideal yang terkandung dalam perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh ayat-ayat tersebut.³²

Perkawinan juga mempunyai tujuan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya, dan mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketentaraman jiwa.³³

Pernikahan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah. Islam menganjurkan hidup berumah tangga dan menghindari hidup membujang.³⁴

Dasar persyariatan nikah adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma. Namun sebagian ulama berpendapat hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah (boleh). Hukum tersebut bisa berubah menjadi sunah, wajib,

³² Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit.* h. 14.

³³ Mohd. Idris Ramulyo, *Op. Cit.* h. 26.

³⁴ Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit.* h. 14.

halal, makruh tergantung kepada illat hukum.³⁵

Pengertian nikah seperti yang dipahami dari kebanyakan pendapat fukaha adalah ikatan yang bertujuan menghalalkan pergaulan bebas dan menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia. Menurut surat Adz-Dzaryat ayat 49 yang menyebutkan.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”.³⁶

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengingatkan tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang.³⁷

Berkeluarga yang baik menurut Islam sangat menunjang untuk menuju kepada kesejahteraan, termasuk dalam mencari rezeki Tuhan.

³⁵ Mardani, *Op.Cit.* h. 11.

³⁶ Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 417 .

³⁷ Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit.* h. 16.

Firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 32 perlu mendapat perhatian bagi orang yang akan berkeluarga:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin niscaya Allah SWT akan memampukan mereka dengan karunianya”.³⁸

Islam menganjurkan orang berkeluarga karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik.³⁹

2. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Positif

Pasal 1 UU No.1/1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sementara mengenai sahnya suatu perkawinan dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 1 UU No.1/1974, yaitu “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.⁴⁰

Selain dari pada itu, menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsāqan ghalīdhan untuk mentaati perintah Allah dan

³⁸Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 282.

³⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Op. Cit.* h. 14-15

⁴⁰ M. Nurul Irfan, “Kriminalisasi Poligami dan Nikah Siri”, *Al-Adalah*, Vol.10 No. 2 (Juli 2011), h. 127.

melaksanakan merupakan ibadah”. Berdasarkan pengertian perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan dan KHI tersebut berbeda dengan pengaturan perkawinan yang tercantum dalam *Burgelijk Wetboek* (BW). Menurut BW, perkawinan hanyalah suatu ikatan yang berhubungan dengan keperdataan saja. Hal ini tertuang dalam Pasal 26 BW yang menyebutkan bahwa, “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”. Hal tersebut menunjukkan bahwa BW memandang perkawinan sekedar ikatan keperdataan yang tidak berbeda dengan perjanjian pada umumnya sedangkan Hukum Islam memandang perkawinan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsāqan ghalizīn*) dan berdimensi ibadah.⁴¹

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat perkawinan dalam Hukum Islam merupakan hal yang penting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sahnya atau tidak sahnya suatu perkawinan. Adapun syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan.

Menurut Pasal 14 KHI rukun perkawinan terdiri atas calon mempelai lelaki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi lelaki, dan ijab Kabul. Jika kelima unsur atau rukun perkawinan tersebut terpenuhi, maka perkawinan adalah sah, tetapi sebaliknya, jika salah satu

⁴¹ Indah Purbasari, *Hukum Islam sebagai Hukum Positif di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2017), h. 77.

atau beberapa unsur atau rukun dari kelima unsur atau rukun tidak terpenuhi, maka perkawinan adalah tidak sah.⁴²

Menurut doktrin hukum Islam dari berbagai mazhab fikih yang ada dinyatakan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi lima rukun yaitu adanya ijab qabul, calon pengantin pria, calon pengantin wanita, dua orang saksi dan wali dari pihak wanita.⁴³

Sahnya perkawinan, menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan adalah apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Dengan demikian, maka sangat jelas bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menempatkan Hukum Agama sebagai hukum terpenting untuk menentukan sah atau tidak sahnya perkawinan.⁴⁴

Rukun perkawinan menurut Hukum Islam adalah wajib dipenuhi oleh orang-orang Islam akan melangsungkan perkawinan. Dampak dari sah atau tidak sahnya perkawinan adalah mempengaruhi atau menentukan hukum kekeluargaan lainnya, baik dalam bidang hukum perkawinan itu sendiri, maupun di bidang hukum kewarisan.

Dalam perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang dilaksanakan menurut Hukum Agama sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang perkawinan berakibat terhadap hubungan hukum antara anak yang dilahirkan hasil perkawinan yang sah dengan ibu dan ayahnya adalah

⁴²Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 107.

⁴³ M. Irfan, "Ambiguitas Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974: Sebuah Bentuk Diskriminasi Hukum", *Al-Adalah*, Vol. 10 No. 3 (Januari 2012), h. 345.

⁴⁴ Neng Djubaidah, *Op. Cit.* h. 107.

menjadi sah pula.⁴⁵

Dengan demikian rukun perkawinan adalah suatu yang wajib ada dalam rangkaian proses pernikahan sementara syarat pernikahan (perkawinan) adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak dari unsur rukun pernikahan. Jadi, baik rukun maupun syarat pernikahan merupakan suatu penentu atau suatu perbuatan hukum yang berkenaan langsung dengan status hukum sah tidaknya pernikahan tersebut. Tidak terpenuhi salah satu rukun dan syarat pernikahan dapat berakibat tidak sahnya pernikahan tersebut.⁴⁶

a. Calon Mempelai Laki-Laki

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang perkawinan). Artinya, kedua calon pihak mempelai sepakat untuk melangsungkan perkawinan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Persetujuan tanpa paksaan tersebut sesuai dengan hak asasi manusia atas perkawinan, dan sesuai pula dengan tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal.⁴⁷

Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama yaitu, calon suami beragama Islam, jelas bahwa calon suami itu betul laki-laki, orangnya diketahui dan tertentu, calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin

⁴⁵ *Ibid*, h. 108

⁴⁶ Indah Purbasari, *Op.Cit.* h. 90.

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), h. 87.

dengan calon istri, calon mempelai laki-laki tahu atau kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya, calon suami rela untuk melakukan perkawinan itu, tidak sedang melakukan ihram, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri, dan tidak sedang mempunyai istri empat.⁴⁸

b. Calon Mempelai Perempuan

Hukum perkawinan Islam telah menentukan dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa calon mempelai perempuan harus dimintakan izinnnya atau persetujuannya sebelum dilangsungkan akad nikah, sebagaimana dimuat dalam asas persetujuan dan asas kebebasan memilih pasangan, serta asas kesukarelaan.⁴⁹

Selain itu, Pasal 16 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengungkapkan bahwa bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat, tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Sebagaimana bukti adanya persetujuan mempelai, pegawai pencatatan nikah menanyakan kepada mereka, seperti yang diungkapkan dalam Pasal 17 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- 1) Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua orang saksi nikah.

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit.* h. 50.

⁴⁹ Neng Djubaidah, *Op. Cit.* h. 109.

- 2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- 3) Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.⁵⁰

Dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki wajib meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua atau walinya sebelum ia melakukan perkawinan. Hal itu adalah tepat, karena perkawinan menurut Hukum Islam tidak hanya sekedar ikatan hukum keperdataan antar individu (suami istri) yang bersangkutan saja, tetapi merupakan ikatan kekerabatan antara dua keluarga besar dari kedua belah pihak calon mempelai.

Selain itu, karena tujuan perkawinan dalam Hukum Islam adalah untuk selama-lamanya, bukan untuk sementara (*nikah mut'ah*), maka tentu wajib berpegang kepada ajaran Islam, bahwa rida Allah adalah rida nya orang tua. Maka layaklah jika sebelum dilakukan perkawinan, orang tua diminta izinnya terlebih dahulu oleh kedua calon mempelai.⁵¹

Syarat-syarat calon mempelai wanita dalam pernikahan adalah, beragama meskipun Yahudi atau Nasrani, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuannya, tidak terdapat halangan perkawinan.⁵²

⁵⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 13.

⁵¹ Neng Djubaidah, *Op. Cit.* h. 110.

⁵² Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Op. Cit.* h.62

Umumnya negara Islam membedakan usia nikah antara calon mempelai pria dengan calon mempelai perempuan. Untuk kaum pria, rata-rata usia nikah adalah 16 hingga 21 tahun, sementara usia nikah bagi kaum perempuan rata-rata berkisar antara 15-18 tahun.⁵³

c. Wali Nikah

Kehadiran wali nikah yang menikahkan menurut Jum'hur Ulama hukumnya wajib. Demikian pula Pasal 19 KHI mengatur bahwa “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.”⁵⁴ “Syarat menjadi wali nikah adalah, laki-laki, baligh, waras akalnya, tidak dipaksa, adil dan tidak sedang ihram.”⁵⁵

Wali nikah ada dua macam yakni wali nasab yaitu wali yang perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah. Ini bisa orangtua kandungnya, dan bisa juga wali aqrab dan ab'ad (saudara terdekat atau yang jauh). Wali hakim yaitu wali yang hak perwaliannya timbul, karena orang tua mempelai perempuan menolak *adlal* atau tidak ada, atau karena sebab lain yang secara fisik ada tetapi hak perwaliannya tidak ada.⁵⁶

Wanita dilarang mengucapkan sighah *al-ijâb* dalam akad nikah, larangan adalah menunjukkan batalnya pekerjaan yang dilarang yaitu larangan wanita menikahkan wanita lain dan wanita yang Pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali dinikahkan oleh wali aqrab (dekat),

⁵³ Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam”, *Al-Adalah*, Vol. 12 No. 2 (4 Desember 2015), h. 815.

⁵⁴ Indah Purbasari, *Op. Cit.* h. 92.

⁵⁵ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 13.

⁵⁶ Ahmad Rofiq, *Op. Cit.* h. 66.

dan apabila tidak ada oleh wali ab'ad (jauh), dan jika tidak ada maka dinikahkan oleh penguasa (wali hakim), dan urutan wali sebagai berikut:

- 1) Ayah
- 2) Kakek
- 3) Saudara laki-laki seayah seibu (sekandung)
- 4) Saudara laki-laki seayah
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- 7) Paman sekandung
- 8) Paman seayah
- 9) Anak laki-laki dari paman sekandung
- 10) Anak laki-laki dari paman seayah
- 11) Hakim.⁵⁷

Dalam agama Islam hubungan antara anak dengan orangtuanya harus terjaga baik, Oleh sebab itu bila seorang anak perempuan hendak berkawin dengan seorang laki-laki, haruslah dengan perantara orang tuanya (walinya) dan dengan persetujuan kedua-duanya (anak dengan orangtuanya), supaya rumah tangga yang didirikan oleh anaknya dengan suaminya, berhubungan baik dengan rumah tangga orang tuanya.⁵⁸

⁵⁷Rohmat, "Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiah, dan Praktiknya di Indonesia", *Al-Adalah*, Vol. 10 No. 2 (Juli 2011), h. 169.

⁵⁸ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990), h. 24.

d. Saksi

Saksi yang dimaksud ialah orang yang menyaksikan pernikahan itu, sekurang-kurangnya dua orang yang dapat dipertanggung jawabkan kesaksiannya, yaitu tidak tuli dan buta, orang gila, atau anak-anak. Selain itu, saksi harus yang bersifat adil dan jujur. Saksi untuk pernikahan muslim hendaklah orang muslim pula. Tidak ada halangan anak sendiri jadi saksi pernikahan, asal dia telah dewasa. Jumhur ulama sepakat bahwa keberadaan saksi dalam pernikahan sangat penting. Apabila tidak dihadiri oleh para saksi, hukum pernikahan menjadi tidak sah walaupun di umumkannya oleh khalayak ramai. Hal ini karena saksi merupakan syarat sahnya pernikahan, bahkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa saksi dalam akad nikah itu termasuk rukun pernikahann.⁵⁹

KHI mengatur mengenai saksi dalam nikah yakni dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2), “saksi dalam perkawinan merupakan rukun dalam pelaksanaan akad nikah. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi”. Pasal diatas menjelaskan bahwa kedudukan wali dalam akad nikah hukumnya wajib, serta jumlah saksi adalah dua orang. Syarat untuk bisa menjadi saksi nikah adalah diatur dalam pasal selanjutnya yakni pasal 25 KHI “yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatannya dan tidak tuna rungu atau tuli.”⁶⁰

⁵⁹ Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit.* h. 254-255.

⁶⁰ Indah Purbasari, *Op. Cit.* 94.

e. *Ijab Qabul*

Akad nikah dapat dilakukan dalam bahasa apapun asalkan dapat menunjukkan kehendak pernikahan yang bersangkutan dan dapat dipahami oleh para pihak dan para saksi. Ulama mazhab sepakat bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan dengan akad yang mencakup *ijāb* dan *qabūl* antara mempelai perempuan (yang di laksanakan oleh walinya) dengan calon mempelai lelaki (wakilnya). Menurut ulama mazhab, perkawinan adalah sah jika dilakukan dengan mengucapkan kata-kata *zaʿwajtu* atau *ankāhtu* (aku nikahkan) dari pihak perempuan yang dilakukan oleh wali nikahnya, dan kata-kata *qābiltu* (aku menerima) dari pihak calon mempelai laki-laki atau orang yang mewakilinya.⁶¹

Syarat-syarat *ijāb qabūl* adalah, Adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai, memakai kata-kata nikah, *tazwīj* atau terjemahan dari kedua kata tersebut, antara *ijāb* dan *qabūl* bersambungan, antara *ijāb* dan *qabūl* jelas maksudnya, orang yang terkait dengan *ijāb* dan *qabūl* tidak sedang ihram haji atau umrah, dan majelis *ijāb* dan *qabūl* itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.⁶²

Persyaratan *ijāb qabūl* tersebut, dijelaskan oleh Pasal 27, 28, dan 29 Kompilasi Hukum Islam. Garis hukum dalam pasal dimaksud diungkapkan dalam Pasal 27 yaitu “*Ijāb qabūl* antara wali dan calon

⁶¹ Neng Djubaidah, *Op. Cit.* h. 115.

⁶² Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Op. Cit.* h. 63.

mempelai pria harus jelas, beruntun dan tidak berselang waktu”. Pasal 28 “Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang berangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain”. Pasal 29 yaitu:

- 1) Yang berhak mengucapkan qabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- 2) Dalam hal-hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan atas aqad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- 3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Ketiga pasal KHI tersebut, dapat dipahami bahwa penyerahan calon mempelai wanita dari wali nikah kepada calon mempelai pria (*ijāb qabūl*) harus bersambung antara kalimat penyerahan dengan kalimat penerimaan. Demikian juga kebiasaan wali nikah mewakilkan hak perwaliannya kepada orang yang mempunyai pengetahuan agama (ulama) atau kepada Pegawai Pencatatan Nikah sudah merata.⁶³

4. Syarat Sahnya Perkawinan

Menurut Hukum perdata, Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan di muka petugas kantor pencatatan sipil. Perkawinan yang dilakukan menurut tata cara suatu agama saja tidaklah sah. Ketentuan

⁶³Zainuddin Ali, *Op. Cit.* h. 22.

tersebut berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Sebagai *ius constitutum* telah merumuskan norma hukum mengenai perkawinan yang sah secara imperative pada Pasal 2, yang berbunyi:

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penjelasan Pasal 2 tersebut diterapkan bahwa, “Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”. Selanjutnya, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya adalah sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam undang-undang ini.⁶⁴

Ada 2 (dua) macam syarat perkawinan, yaitu syarat materiil dan syarat formal. Syarat materiil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, syarat materiil ini disebut juga dengan syarat subjektif. Sedangkan syarat formal adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang, disebut juga “syarat objektif”.⁶⁵

Syarat-syarat perkawinan dalam hukum Nasional diatur dalam ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1

⁶⁴ Rosnidar Sembiring, *Op. Cit.* h. 54.

⁶⁵ Abdulkadir Muhammad, *Loc. Cit.*

Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang di dalamnya meliputi persyaratan materiil maupun syarat formal. Dalam melaksanakan perkawinan. Persyarat materiil berkenaan dengan calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan, yang meliputi:

1) Persyaratan terhadap orangnya (para pihak)

Persyaratan berikut berlaku umum bagi semua perkawinan, yaitu:

- a) Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai.
- b) Calon mempelai sudah berumur 19 tahun bagi pria dan 18 tahun bagi wanita.
- c) Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali bagi laki-laki yang beristri lebih dari seorang.
- d) Bagi wanita tidak sedang dalam jangka waktu tunggu atau masa *iddah*.⁶⁶

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.⁶⁷ Adapun ketentuan yang berlaku khusus bagi perkawinan orang tertentu adalah:

- a) Tidak terkenal larangan atau halangan melakukan perkawinan, baik menurut undang-undang maupun hukum masing-masing dan kepercayaannya itu.

⁶⁶ Rosnidar Sembiring, *Op. Cit.* h. 55.

⁶⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Op. Cit.* h. 58.

- b) Tidak terkena larangan kawin kembali untuk ketiga kalinya setelah kawin dan bercerai lagi untuk kedua kalinya berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Memperoleh izin dari orang tua atau wali calon mempelai, dan mendapat izin pengadilan bagi mereka yang hendak beristri lebih dari seorang (berpoligami).

Syarat materiil maupun syarat formil yang terkandung dalam ketentuan Pasal 2 tersebut memiliki aspek perdata dan aspek administratif. Aspek perdata membicarakan fungsi substansi dan aspek pendaftaran membicarakan fungsi administrative. Fungsi yang terakhir adalah untuk kejelasan dan kepastian hukum adanya perkawinan yang sudah dilakukan oleh suami istri bagi masyarakat dan Negara.⁶⁸

B. Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Positif

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah. Oleh karena itu, akan dikaji mengenai langkah-langkah Pembatalan setelah perkawinan selesai dilangsungkan, dan diketahui adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi menurut Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan.⁶⁹

Pada dasarnya suatu perkawinan dikatakan batal (dibatalkan) apabila perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syarat sesudah dianjurkan kepengadilan. Dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan,

⁶⁸ Rosnidar Sembiring, *Op. Cit.* h. 56.

⁶⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 37.

pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama mempelai. Jika menurut agamanya perkawinan itu sah maka pengadilan tidak bisa membatalkan perkawinan.

Di dalam Pasal 85 KUH Perdata berlaku asas pokok, bahwa tiada suatu perkawinan menjadi batal karena hukum. Pernyataan batal suatu perkawinan yang bertentangan dengan undang-undang disyaratkan adanya keputusan pengadilan, keputusan yang demikian hanya boleh dijatuhkan dalam hal-hal yang diatur oleh undang-undang dan atas gugatan orang-orang yang dinyatakan berwenang untuk itu.

Menurut Pasal 22 Undang-Undang perkawinan, yang menyatakan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan, bila para pihak tidak memenuhi syarat melangsungkan perkawinan, namun bila rukun yang tidak terpenuhi berarti pernikahan yang tidak sah.⁷⁰ Abd Al –Rahman Al-Juzairy yang dikutip Ahmad Rofiq menyatakan:

النِّكَاحُ الْفَاسِدُ هُوَ مَا احْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِهِ وَالنِّكَاحُ الْبَاطِلُ هُوَ مَا احْتَلَّ رُكْنٌ
مِنْ أَرْكَانِهِ وَالنِّكَاحُ الْفَاسِدُ وَالْبَاطِلُ حُكْمُهَا وَاحِدٌ

Artinya: “Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya, sedang nikah bathil ialah apabila tidak memenuhi rukunnya. Hukum nikah fasid dan bathil adalah sama yaitu tidak sah”.⁷¹

⁷⁰ Khoirul Abror, *Op. Cit.* h. 82-83

⁷¹ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.* h. 120.

Perkawinan dapat dibatalkan berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 Pasal 22, 24, 26 dan 27, serta berdasarkan KHI pasal 70 dan 71 sebagai berikut:⁷²

- a. Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 22).
- b. Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini (Pasal 24).
- c. Ayat (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatatan perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri (pasal 26 ayat 1).Ayat (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatatan perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah (Pasal 26 ayat 2).

⁷²Khoirul Abror, *Loc. Cit.*

- d. Ayat (1) seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan berlangsung di bawah ancaman yang melanggar hukum (Pasal 27 ayat 1). Ayat (2) seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri (Pasal 27 ayat 2). Ayat (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur (Pasal 27 ayat 2).⁷³

Selain itu, dalam sistematika yang berbeda, Kompilasi Hukum Islam seperti dalam Pasal 70 KHI perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i.
- b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya.
- c. Seorang yang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddah nya.

⁷³Ibid, h. 84-85.

- d. Perkawinan dilakukan antar dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan.⁷⁴

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
- d. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan.
- e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.⁷⁵

Selanjutnya Pasal 71 dijelaskan perkawinan yang dapat dibatalkan

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *matqud* (menghilang tanpa berita apakah masih hidup atau sudah meninggal).
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

⁷⁴ Tihami, Sohari Sahrani, *Op. Cit.* h. 203.

⁷⁵ Indah Purbasari, *Op. Cit.* h.124.

- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.⁷⁶

2. Pengertian Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Menurut Hukum Islam, akad perkawinan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dan mengandung akibat-akibat serta konsekuensi-konsekuensinya tentu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Pelaksanaan akad pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam adalah perbuatan yang sia-sia, bahkan dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang wajib dicegah oleh siapapun yang mengetahuinya, atau dengan cara pembatalan apabila pernikahan itu telah dilaksanakannya.⁷⁷

Batal yaitu “rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh syara”. Batalnya perkawinan yaitu “rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama”. Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut juga dengan *fasakh*. *Fasakh* bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang dan membatalkan perkawinan.⁷⁸ Dimaksud memfasakh akad nikah

⁷⁶ Ahmad Rofiq, *Op. Cit.* h. 122.

⁷⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 42.

⁷⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit.* h. 141-142.

adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan istri.⁷⁹

Pisahanya suami istri akibat *fasakh* berbeda dengan pisahnya karena talak. Sebab talak ada *raj'i* dan talak *ba'in*. Talak *raj'i* tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika, sedangkan talak *ba'in* mengakhirinya seketika itu juga. Adapun *fasakh*, baik karena hal-hal yang terjadi belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, ia mengakhiri perkawinan seketika itu.⁸⁰

Menurut ketentuan hukum Islam, siapa yang melihat dan mengetahui akan adanya seorang berkehendak untuk melangsungkan pernikahan, padahal diketahui bahwa pernikahan cacat hukum karena kurangnya rukun atau syarat yang ditentukan, maka pernikahan tersebut wajib dicegah sehingga perkawinan itu tidak jadi dilaksanakan. Jika mengetahui setelah akad nikah dilaksanakan, maka wajib mengajukan pembatalan kepada instansi yang berwenang. Pembatalan perkawinan berlaku terhadap segala bentuk perkawinan yang tidak sah, baik yang bersifat *nikāh bathil*. Maupun yang bersifat *nikāh fasid*, baik sebelum terjadi persetubuhan maupun sesudah terjadi persetubuhan. Agar tidak terjadi *wāthi' syūbhat* antara suami istri yang melaksanakan perkawinan yang tidak sah itu, maka seketika diketahui perkawinan tersebut adanya cacat hukum, kepada suami istri tersebut dilarang berkumpul lebih dahulu

73. ⁷⁹ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat II* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h.

⁸⁰ Tihami, Sohari Sahrani, *Op. Cit.* h. 197.

sambil menunggu penyelesaian perkaranya diselesaikan oleh pihak yang berwenang.⁸¹

3. Syarat dan Cara Pembatalan

Sama halnya dengan “pencegahan” tidak setiap orang dapat mengajukan “pembatalan” perkawinan ke pengadilan.⁸² Mengenai orang-orang yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, diatur dalam Pasal 23 UU Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.
- b. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- c. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Ada perbedaan rumusan redaksional pada huruf c dan d antara Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi. Dalam kompilasi redaksinya sebagai berikut:

- a. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.

⁸¹ Abdul Manan, *Op. Cit.* h. 44.

⁸² Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), h. 30.

- b. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.⁸³

Selain permohonan pembatalan perkawinan itu, juga Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam mengatur tata cara beracara dalam permohonan pembatalan perkawinan, dan mengatur awal waktu keberlakuan pembatalan perkawinan dimaksud. Hal ini diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 74 KHI. Pasal 74 KHI berbunyi:

- a. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan berlangsung.
- b. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.⁸⁴

Khusus dalam hubungan suami istri, seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan berlangsung di bawah ancaman yang melanggar hukum, pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka tentang diri suami atau istri dengan syarat bahwa dalam jangka waktu enam bulan setelah tidak ada ancaman lagi, atau yang bersalah sangka itu menyadari dirinya,

⁸³ Wagianto, "Kritik Sosiologi Hukum Islam terhadap Fakta Hukum Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Depok Jawa Barat", *Al-Adalah*, Vol. 12 No. 2 (Desember 2014), h. 277.

⁸⁴ Zainuddin Ali, *Op. Cit.* h. 39.

mereka masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.⁸⁵

4. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Pembicaraan pembatalan perkawinan mengesankan bahwa perkawinan itu sebelumnya telah berlangsung dan bisa jadi buah dari perkawinan itu telah ada seperti anak dan harta bersama. Di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 28 ayat (2) dinyatakan, Keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- b. Suami atau istri yang bertindak dengan beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam huruf a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.⁸⁶

Meskipun KHI mengatur batalnya perkawinan, Pasal 75 KHI juga mengatur bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad.
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

⁸⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.* h. 111.

⁸⁶ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Op. Cit.* h. 113.

- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.⁸⁷

Adapun Pasal 76 KHI yang menyatakan bahwa, “batalnya suatu perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”. Penjelasan ini tidak merinci secara teknis mengenai proses hubungan perkawinan yang seharusnya dibatalkan oleh yang berwenang. Oleh karena itu, suami dan istri dalam proses pembatalan perkawinannya di Pengadilan Agama, tidak melakukan hubungan pergaulan. Hal ini dimaksudkan supaya tidak melanggar prinsip-prinsip hukum Islam. Garis hukum Islam yang diatur oleh Pasal 76 KHI adalah untuk melindungi kemaslahatan dan kepentingan hukum serta masa depan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang akan dibatalkan oleh Pengadilan agama, sehingga kekeliruan orangtua tidak dapat di limpahkan kepada anak-anaknya. Meskipun secara psikologis, jika pembatalan perkawinan dimaksud benar-benar terjadi, akan membawa akibat yang tidak menguntungkan bagi kepentingan anak-anak tersebut. Akan tetapi, untuk tegaknya hukum dalam masyarakat maka kebenaran harus diwujudkan dalam kenyataan walaupun dalam suasana kepahitan.⁸⁸

Ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Ini berarti anak-anak yang lahir dari perkawinan itu adalah anak-

⁸⁷ Indah Purbasari, *Op. Cit.* h. 127.

⁸⁸ Zainuddin Ali, *Op. Cit.* h. 40.

anak mereka berdua dan dinyatakan sebagai anak sah.

Selanjutnya dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b dinyatakan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan pada adanya perkawinan lain yang lebih dulu. Ini terdapat pada perkawinan poligami karena perkawinan terdahulu sudah ada. Maka perkawinan yang lebih kemudian tetap suami atau istri yang sah dan pihak lainnya itu sejak perkawinan dilangsungkan sampai saat keputusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Akan tetapi, mengenai harta bersama dianggap tidak pernah ada dalam perkawinan yang lebih kemudian itu. Arti itikad baik adalah tindakan itu sudah sesuai dengan perbuatan orang yang normal dan yang baik dengan mengingat keadaan dan kedudukannya dalam masyarakat.

Terakhir, dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c dinyatakan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap orang-orang ketiga lainnya yang tidak termasuk dalam huruf a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.⁸⁹

C. Wali

1. Pengertian Wali

Perwalian (dari kata bahasa Arab: *walāyah* atau *wilāyah*) adalah hak yang diberikan oleh syariat yang membuat wali (yakni pelaksana

⁸⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.* h. 112.

perwalian) mengambil dan melakukan sesuatu, kalau perlu secara paksa, di luar kerelaan dan persetujuan dari orang yang diperwalikan. Adakalanya perwalian meliputi harta seseorang ataupun haknya dalam pernikahan.⁹⁰

Perwalian dalam literatur fikih Islam disebut dengan *Al-Walāyah* (*Alwilāyah*), seperti kata *Ad-dālalah* yang juga bisa disebut dengan *Ad-Dilālāh*. Secara etimologis, dia memiliki beberapa arti, di antaranya adalah cinta (*Al-Mahabbah*) dan pertolongan (*An-Nashrah*). Seperti dalam ungkapan *Al-Wali* yakni orang yang mempunyai kekuasaan. Hakikat dari *Al-Walāyah* (*Al-Wilāyah*) adalah “*tawalliy Al-Amr*” (mengurus atau menguasai sesuatu).⁹¹

Pada umumnya dalam tiap perwalian, hanya ada seorang wali saja.⁹² Wali nikah adalah orang yang menikahkan seorang wanita dan seorang pria. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya (Pasal 19 KHI).⁹³

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ مَرْفُوعًا لَا نِكَاحَ

إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ

⁹⁰ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan, 2002), h. 56.

⁹¹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005), h. 134.

⁹² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1993), h. 53.

⁹³ Zainuddin Ali, *Op. Cit.* h. 15.

Artinya: Imam Ahmad meriwayatkan hadist Marfu' dari Hasan, dari Imran bin Hushain, "Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi".⁹⁴

Perwalian dalam arti umum yaitu "segala sesuatu yang berhubungan dengan wali". Wali mempunyai banyak arti, antara lain:⁹⁵

- a. Orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.
- b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
- c. Orang saleh (suci), penyebar agama.
- d. Kepala pemerintah dan lain sebagainya⁹⁶

Perwalian menurut hukum perdata ialah "pengawasan terhadap anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, serta pengurusan benda atau kekayaannya anak tersebut sebagaimana diatur oleh undang-undang".⁹⁷

Dalam Pasal 1 Kompilasi, ketentuan umum huruf h dikemukakan, perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian, wali adalah orang yang diberi kewenangan

⁹⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh, Khalifaturrahman, Haer Haeruddin dengan judul *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum* (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 430.

⁹⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Op. Cit.* h. 165.

⁹⁶ Tihami, Sihari Sahrani, *Op. Cit.* h. 207.

⁹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit.* h. 192.

untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak yang tidak memiliki kedua orang tua, atau karena kedua orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum.⁹⁸

Mengenai perwalian ini, Kompilasi Hukum Islam tentang perwalian diatur dalam Pasal 107, sebagai berikut:

- a. Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan pernikahan.
- b. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
- c. Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut
- d. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.⁹⁹

Pembatasan usia 21 tahun atau telah kawin tersebut ditentukan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan kemandirian anak, ini dapat dianalogikan dengan janda, apabila ingin kawin, ia dapat melakukan tanpa persetujuan walinya, karena ia lebih berhak atas dirinya.¹⁰⁰

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهِمَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ
إِذْنُهَا سَكُونُهَا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

⁹⁸ Ahmad Rofiq, *Op. Cit.* h. 205.

⁹⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Op. Cit.* h. 171.

¹⁰⁰ Ahmad Rofiq, *Op. Cit.* h. 210.

Artinya: Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Saw bersabda, “seorang janda lebih berhak menentukan (pilihan) dirinya dari pada walinya. Dan seorang gadis diajak berembuk, dan tanda izinnya adalah diamnya.” (HR Imam Muslim).¹⁰¹

Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 19 menyatakan bahwa “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Pasal 20 dinyatakan:

- a. Bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, *akil* dan *balig*.
- b. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.¹⁰²

Keberadaan wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi, maka untuk menjadi wali nikah itu haruslah terpenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰³ Bagi sahnya perwalian disyaratkan enam syarat, yakni: berakal, merdeka, Islam, laki-laki, *balig* dan adil.

Perwalian itu ditetapkan untuk membantu ketidakmampuan orang yang menjadi objek perwalian dalam mengekspresikan dirinya. Sedangkan orang yang tidak berakal pasti tidak akan mampu melakukannya dan tidak dapat mewakili orang lain, sehingga orang lain lebih berhak menerima perwalian tersebut. Baik orang yang tidak berakal itu karena keadaannya yang masih kanak-kanak atau karena hilang ingatan atau karena faktor usia tua. Syarat berikutnya adalah merdeka, menurut pendapat sekelompok

¹⁰¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Op. Cit.* h. 431.

¹⁰² Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Op. Cit.* h. 72.

¹⁰³ Abdul Manan, *Op. Cit.* h. 61.

ulama, seorang budak laki-laki tidak mempunyai hak perwalian, baik atas dirinya sendiri maupun atas orang lain.¹⁰⁴

Beragama Islam, ini menurut kesepakatan para ulama, syarat ini didasarkan pada firman Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.¹⁰⁵

Dalam Pasal 20 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam hanya menyebutkan bahwa yang dapat bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Islam, yakni muslim, *akil* dan *baligh*.¹⁰⁶ Laki-laki merupakan syarat perwalian karena dianggap lebih sempurna, sedangkan wanita dianggap mempunyai kekurangan, wanita tidak sanggup mewakili dirinya sendiri apalagi orang lain.¹⁰⁷

¹⁰⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2004), h. 58.

¹⁰⁵ Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 158.

¹⁰⁶ Abdul Manan, *Op. Cit.* h. 61.

¹⁰⁷ Syaikh Hasan Ayyub, *Op. Cit.* h. 59.

Syarat selanjutnya *balig*, Orang gila dan anak kecil tidak dibenarkan menjadi wali nikah karena orang-orang tersebut tidak berhak mewalikan dirinya sendiri apalagi terhadap orang lain. Syarat yang keenam adalah adil, seorang wali tidak disyaratkan orang adil, dengan demikian seorang durhaka tidak kehilangan haknya untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan, kecuali kedurhakannya sudah melampaui batas-batas maksimal menurut ukuran moral yang patut.¹⁰⁸

1. Pandangan Ulama Mazhab tentang Wali

Mayoritas ulama, termasuk Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada pernikahan tanpa wali, dan wali merupakan syarat sahnya pernikahan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Malik. Imam Abu Hanifah, Zufar, Asy Sya'bi, dan Az-Zuhri berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedang calon suaminya sebanding (*kufu*), maka pernikahannya boleh.¹⁰⁹ Perbedaan pendapat ini sebagai berikut:

a. Wali nikah menurut Mazhab Syafi'i

Wali merupakan masalah penting sekali dalam pembahasan nikah karena tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat bagi sahnya suatu nikah. Lebih tegas menurut Syafi'i, kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah perkawinan tidak sah. Dasar keharusan wali, dan sekaligus larangan

¹⁰⁸ Abdul Manan, *Op. Cit.* h. 61.

¹⁰⁹ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 84.

wali mempersulit menurut Syafi’I, adalah QS. An-Nisâ’ (4): 25 sebagai berikut:¹¹⁰

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُم مِّنْ
 بَعْضٍ ۚ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
 مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسَفِّحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ
 أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ
 ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ



Artinya: “Dan Barang siapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya, dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separe hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.¹¹¹

¹¹⁰ Khoirul Abror, *Op. Cit.* h. 93-94.

¹¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Diponegoro: Al-Hikmah, 2014), h. 82.

Dalam hadis lain mengatakan:

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ)

Artinya: Dari Aisyah radhiyallaahu'anha bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, “Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jika laki-laki telah mencampurnya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika mereka bertengkar, maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali”. (HR Imam Empat kecuali an-Nasa’I, dan hadist shahih menurut Ibnu ‘Awanah, Ibnu Hibban, dan al-Hakim).¹¹²

Dalam hadis Rasulullah tersebut terlihat bahwa seorang perempuan yang hendak menikah disyaratkan harus memakai wali, berarti tanpa wali maka nikah itu batal menurut Hukum Islam atau nikahnya tidak sah.¹¹³

Imam Syafi’i mengenai keabsahan, yakni anak laki-laki tidak termasuk asabah seorang wanita, berdasarkan hadis riwayat Umar R.A. yang menyebutkan:

لَا تَنْكِحُ الْمَرْأَةَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَوْ السُّلْطَانِ. (احديث)

Artinya: “Wanita tidak boleh menikah, kecuali dengan izin walinya, atau orang cerdas dari kalangan keluarganya, atau penguasa”.(Al-Hadis)¹¹⁴

Wali harus ada dalam melaksanakan akad nikahnya atau mengizinkan wanita itu untuk mewakili kepada laki-laki yang dipercaya

¹¹² Ibnu Hajar al-Asqalani, *Op. Cit.* h. 431.

¹¹³ Mohd. Idris Ramulyo, *Op. Cit.* h. 3.

¹¹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul ‘I-Mujtahid*, diterjemahkan oleh, Abdurrahman, Haris Abdullah dengan judul *Tarjamah Bidayatul ‘I-Mujtahid* (Semarang: CV Asy Syifa’, 1990), h. 375.

untuk menikahkannya. Dan jika ia mewakilkan kepada orang lain tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal.¹¹⁵ Imam Syafi'i berpendapat bahwa seseorang tidak boleh mengawinkan seorang gadis atau janda manakala ayahnya ada.¹¹⁶

Pengucapan *ijāb* itu perlu diwakilkan kepada walinya, jadi wali itu sebenarnya wakil dari pengantin perempuan biasanya diwakili oleh ayahnya, bilamana tidak ada ayah, dapat digantikan oleh kakeknya (ayah dari ayah). Karena wanita itu pada umumnya (*fitriah*) adalah pemalu.¹¹⁷

Menurut Mazhab Syafi'i, orang yang berhak menjadi wali, ialah ayah kalau ayah telah meninggal atau tidak mencakupi syarat-syarat menjadi wali maka digantikan oleh kakek (ayah dari ayah). kakek tidak ada maka yang menjadi wali kakek-kakek dan begitulah seterusnya sampai ke atas. Kakek-kakek sampai keatas tidak ada maka saudara laki-laki kandung (seibu seayah), kalau tidak ada maka saudara laki-laki seayah. Kalau saudara laki-laki seayah tidak ada maka yang menjadi wali anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada maka anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan begitu seterusnya sampai kebawah. Kalau anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah tidak ada sampai kebawah, maka yang menjadi wali paman (saudara dari ayah) kandung, kalau tidak maka paman seayah. Kalau paman seayah tidak ada maka yang

¹¹⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Op. Cit.* h. 50.

¹¹⁶ Ibnu Rusyd, *Op. Cit.* h. 376.

¹¹⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Op. Cit.* h. 2.

menjadi wali anak paman kandung, kalau tidak ada maka anak paman seayah dan begitulah seterusnya sampai ke bawah.¹¹⁸

b. Wali Nikah Menurut Mazhab Hanafi

Hanafi mengatakan bahwa wali adalah sunnah hukumnya, oleh karenanya perkawinan tanpa wali (menikahkan diri sendiri), atau meminta orang lain di luar wali nasab untuk menikahkan gadis atau janda, *sekufu* atau tidak adalah boleh.¹¹⁹ Dasar hukum Hanafi membolehkan perkawinan tanpa wali adalah QS. Al-Baqarah 234.¹²⁰

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.¹²¹

Para penganut madzhab Hanafi membolehkan wanita menikahkan dirinya sendiri. Dalam hal itu mereka menggunakan dalil dengan mengqiyaskan akad nikah kepada akad jual beli. Sesungguhnya wanita itu mempunyai kemandirian dalam melakukannya.¹²²

¹¹⁸ Mahmud Yunus, *Op. Cit.* h. 55-56.

¹¹⁹ Khoirul Abror, *Op. Cit.* h. 92.

¹²⁰ Mohd. Idris Ramulyo, *Op. Cit.* h. 6.

¹²¹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 30.

¹²² Syaikh Hasan Ayyub, *Loc. Cit.*

Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat sebagaimana yang dikutip dari Sayyid Sabiq, sesungguhnya wanita yang sudah dewasa dan berakal sehat berhak mengurus sendiri aqad pernikahannya, baik ia gadis maupun janda. Tetapi yang sebaiknya menguasai aqad nikahnya itu kepada walinya, demi menjaga pandangan yang kurang wajar dari pihak pria asing, seandainya ia sendiri yang melangsungkan aqad nikahnya itu. Tetapi wali 'ashib (ahli waris) tidaklah mempunyai hak untuk menghalang-halangnya bila mana seorang wanita menikah dengan seorang pria yang tidak sederajat atau dengan mahar yang kurang dari batas minimal. Jika seorang wanita kawin dengan pria yang tidak sederajat tanpa persetujuan wali 'ashibnya, pernikahan tersebut tidak sah.¹²³

Para penganut Madzhab Hanafi berpendapat bahwa wali yang paling dekat yang tidak ada di tempat, maka perwaliannya itu diserahkan kepada wali yang lebih jauh. Dan jika wali yang paling dekat itu meninggal dunia atau tidak waras, maka menurut kesepakatan, pernikahannya diserahkan kepada wali yang lebih jauh setelahnya. Mereka membedakan antara keduanya adalah, karena kematian dan gila itu menggugurkan kedudukannya sebagai wali, sedangkan ketidakhadiran di tempat tidak menggugurkan perwaliannya, melainkan ia hanya sebatas tidak dapat menikahkannya semata.¹²⁴

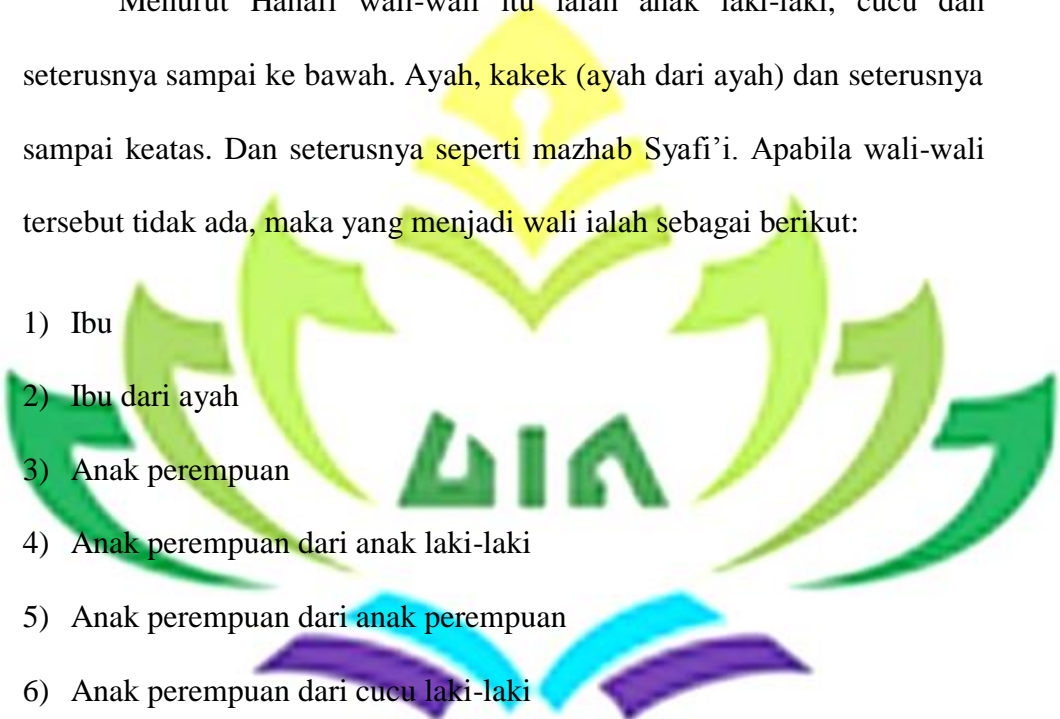
Akad nikah yang dilakukan oleh wanita dan segala sesuatu yang dikerjakannya tanpa menggantungkannya kepada wali atau izinnya adalah

¹²³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah* 7 (Bandung: PT Al Ma' Arif, 1994), h. 15.

¹²⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Op. Cit.* h. 51.

sah. Dengan kata lain Hanafi memberikan hak sepenuhnya kepada wanita mengenai urusan dirinya dengan meniadakan campur tangan orang lain, dalam hal ini adalah campur tangan seorang wali berkenaan dengan masalah perkawinan. Pertimbangan rasional logis inilah yang membuat Hanafi mengatakan tidak wajibnya wali nikah bagi wanita yang hendak menikah.¹²⁵

Menurut Hanafi wali-wali itu ialah anak laki-laki, cucu dan seterusnya sampai ke bawah. Ayah, kakek (ayah dari ayah) dan seterusnya sampai keatas. Dan seterusnya seperti mazhab Syafi'i. Apabila wali-wali tersebut tidak ada, maka yang menjadi wali ialah sebagai berikut:

- 
- 1) Ibu
 - 2) Ibu dari ayah
 - 3) Anak perempuan
 - 4) Anak perempuan dari anak laki-laki
 - 5) Anak perempuan dari anak perempuan
 - 6) Anak perempuan dari cucu laki-laki
 - 7) Anak perempuan dari cucu perempuan dan begitulah seterusnya sampai kebawah
 - 8) Ayah dari ibu
 - 9) Saudara perempuan kandung
 - 10) Saudara perempuan seayah
 - 11) Saudara seibu dan anak-anaknya

¹²⁵ Khoirul Abror, *Op. Cit.* h. 93.

- 12) Bibi (saudara perempuan dari ayah)
- 13) Saudara laki-laki dari ibu
- 14) Saudara perempuan dari ibu
- 15) Anak perempuan dari paman dan bibi, kemudian anak-anaknya dan begitulah seterusnya sampai ke bawah.¹²⁶

Kesimpulannya menurut Madzhab Hanafi bahwa wali nikah itu tidak merupakan syarat untuk sah nikah, tetapi baik itu laki-laki maupun wanita yang hendak menikah sebaiknya mendapatkan restu atau izin orangtua.¹²⁷

c. Wali Nikah Menurut Mazhab Maliki

Imam Malik mengungkapkan, “jika ada seorang wanita yang hidup dalam kesusahan atau yang baru masuk Islam atau wanita miskin yang dinikahkan oleh tetangga atau orang lain, yang buka termasuk walinya, maka yang demikian itu diperbolehkan. Sedangkan wanita yang memiliki posisi, dan dinikahkan oleh selain walinya, maka kedua pasangan itu harus dipisahkan, meskipun wali wanita itu pada dasarnya membolehkan”.¹²⁸

Menurut Maliki, seorang yang mengasuh perempuan yang telah meninggal ayahnya dan tak ada lagi keluarganya, sehingga dia yang mendidik perempuan itu beberapa tahun lamanya, maka ia berhak menjadi wali bagi perempuan itu. Ada yang dimaksud dengan wali umum, yaitu tiap-tiap orang islam berhak menjadi wali sebagai *fardlu kifāyah*. Apabila

¹²⁶ Mahmud Yunus, *Op. Cit.* 56.

¹²⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Op. Cit.* h. 8.

¹²⁸ Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), h. 387.

seorang perempuan mewakili kepada seorang laki-laki muslim untuk melakukan aqad nikah, lalu dikawinkannya perempuan itu, maka sahlah perkawinan itu, menurut mazhab Maliki, tetapi dengan syarat perempuan itu orang kebanyakan dan tak ada lagi ayah. Maka pada hakikatnya perempuan kebanyakan itu perlu juga memakai wali, yaitu wali umum, hanya yang tidak perlu ialah wali khusus. Apabila perempuan itu melakukan aqad nikah dengan sendirinya, maka perkawinan itu tidak sah menurut Maliki.¹²⁹ Wali adalah syarat untuk mengawinkan perempuan bangsawan, bukan untuk mengawinkan perempuan awam.¹³⁰

Wali-wali menurut Mazhab Maliki sebagai berikut:

- 1) Ayah
- 2) Washi (orang yang menerima wasiat dari ayah)
- 3) Anak laki-laki, meskipun anak itu dari sebab perzinaan
- 4) Cucu laki-laki
- 5) Saudara laki-laki kandung
- 6) Saudara laki-laki seayah
- 7) Anak laki-laki dari saudara kandung
- 8) Anak laki-laki dari saudara seayah
- 9) Kakek seayah
- 10) Paman kandung
- 11) Anak paman kandung
- 12) Paman seayah

¹²⁹ Mahmud Yunus, *Op. Cit.* h. 57.

¹³⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Op. Cit.* h. 60.

- 13) Anak paman seayah
- 14) Ayah dari kakek
- 15) Paman dari ayah
- 16) Orang yang mengasuh perempuan.¹³¹

d. Wali Nikah Menurut Mazhab Hanbali

Menurut mazhab Hanbali, dalam Al-Mughni, Ibnu Qudamah dari mazhab Hanbali menyatakan, wali harus ada dalam perkawinan (rukun nikah), yakni harus hadir ketika melakukan akad nikah. Keharusan ini berdasarkan hadis Nabi, bahwa dalam perkawinan harus ada wali. Ibnu Qudamah menepis dengan mengatakan, bahwa hadis yang mengharuskan adanya wali bersifat yang berarti berlaku untuk semua, sementara hadis yang menyebut hanya butuh izin adalah yang bersifat khusus. Alasan tambahan, larangan nikah tanpa wali (perintah harus ada wali), bertujuan menghindari adanya kecenderungan dan keinginan wanita kepada pria yang kadang kurang pertimbangan yang matang. Maka kehadiran wali diharapkan dapat menghindari kecenderungan tersebut.¹³²

Menurut Hanbali wali-wali itu sebagai berikut:

- 1) Ayah
- 2) Washi ayah sesudah wafatnya
- 3) Kakek (ayah, dari ayah) dan seterusnya sampai ke atas
- 4) Anak laki-laki
- 5) Cucu laki-laki dan seterusnya sampai ke bawah

¹³¹ Mahmud Yunus, *Loc. Cit.*

¹³² Khoirul Abror, *Op. Cit.* h. 95.

- 6) Saudara kandung
- 7) Saudara seayah
- 8) Anak laki-laki dari saudara kandung
- 9) Anak laki-laki dari saudara seayah, kemudian anak-anaknya sampai kebawah
- 10) Paman kandung
- 11) Paman seayah
- 12) Anak laki-laki dari paman kandung, Anak laki-laki dari paman seayah, dan seterusnya sampai ke bawah
- 13) Paman kakek
- 14) Anak laki-laki dari paman kakek
- 15) Paman ayah dari kakek, kemudian anak-anaknya sampai kebawah.

Menurut Hanbali, kalau tidak ada wali hakim maka yang menjadi wali ialah seorang laki-laki yang adil diantara kaum Muslimin.¹³³

2. Macam-Macam Wali Nikah

Wali nikah perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya (Pasal 19 KHI). Apabila rukun ini tidak dipenuhi maka status perkawinannya tidak sah. Keberadaan wali nikah merupakan rukun, oleh karena itu harus dipenuhi beberapa syarat. Dalam Pasal 20 KHI ayat (1) dirumuskan sebagai berikut: “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, aqil dan baligh.

¹³³ Mahmud Yunus, *Op. Cit.* h.58.

Dalam pelaksanaannya, akad nikah atau ijab dan qabul, penyerahannya dilakukan oleh wali mempelai perempuan atau yang mewakilinya, dan qabul (penerimaan) oleh mempelai laki-laki.¹³⁴

a. Wali Nasab

Wali *nasab* adalah wali yang hak perwaliannya didasari oleh adanya hubungan darah. Sebagai contoh orang tua kandung, sepupu satu kali melalui garis ayahnya. Kompilasi Hukum Islam merinci tentang wali *nasab* dan wali hakim dalam Pasal 21, 22, dan 23.¹³⁵ Pasal 21 sebagai berikut:

- 1) Wali *nasab* terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita seperti, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki sekandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Kelompok saudara laki-laki sekandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.¹³⁶
- 2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi

¹³⁴ Ahmad Rofiq, *Op. Cit.* h. 64-65.

¹³⁵ Zainuddin Ali, *Op. Cit.* h. 16.

¹³⁶ Indah Purbasari, *Op. Cit.* h. 92.

wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

- 3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah
- 4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung, atau sama-sama kerabat ayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat wali.¹³⁷

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 22 menyebutkan apabila wali nikah yang berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu, atau sudah *udzur*, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Apabila hak perwalian tersebut diurutkan lebih rinci sebagai berikut:

- 1) Ayah kandung
- 2) Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya keatas dalam garis laki-laki
- 3) Saudara laki-laki sekandung
- 4) Saudara laki-laki seayah
- 5) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- 6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- 7) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung

¹³⁷ Zainuddin Ali, *Op. Cit.* h. 17.

- 8) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- 9) Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
- 10) Anak laki-laki paman sekandung
- 11) Anak laki-laki paman seayah
- 12) Saudara laki-laki kakek sekandung
- 13) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung
- 14) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah¹³⁸.

Wali *nasab* dibagi menjadi dua, yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). Yang termasuk wali *aqrab* adalah wali ayah, sedangkan wali jauh adalah kakak atau adik ayah. Jika kakak dan adik ayah menjadi wali dekat, yang berikutnya terus kebawah menjadi wali jauh. Adapun perpindahan wali *aqrab* kepada wali *ab'ad* adalah sebagai berikut:¹³⁹

- 1) Wali yang mempunyai urutan dekat tidak ada sama sekali
- 2) Wali yang mempunyai urutan dekat ada, tetapi belum baligh
- 3) Wali yang mempunyai urutan dekat ada, tetapi menderita penyakit gila
- 4) Wali yang mempunyai urutan dekat ada, tetapi pikun karena tua
- 5) Wali yang mempunyai urutan dekat ada, tetapi tidak beragama Islam, sedang calon mempelai wanita beragama Islam.¹⁴⁰

b. Wali Hakim

Wali hakim seorang yang bertindak sebagai wali yang timbul karena yang menjadi wali dari perempuan belum *baligh*, tidak berhalangan hadir, dan nonmuslim. Wali hakim yang bertindak menggantikan wali

¹³⁸ Ahmad Rofiq, *Op. Cit.* h. 67.

¹³⁹ Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit.* h. 248.

¹⁴⁰ Zainuddin Ali, *Op. Cit.* h. 18.

nasab untuk menikahkan kedua calon suami istri apabila wali *nasab* tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghoib* atau wali *adhol* (tidak berkenaan menikahkan) atau enggan.¹⁴¹

Wali hakim diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintah. Orang yang berhak menjadi wali hakim adalah kepala Pemerintahan dan Khalifah (pemimpin), penguasa pemerintahan atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.¹⁴² Dalam Pasal 23 menyebutkan bahwa:

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali *nasab* tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggal atau *ghoib* atau *'adlal* atau enggan.
- 2) Dalam hal wali *'adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.¹⁴³

Perpindahan wali nikah berdasarkan hubungan darah kepada wali nikah berdasarkan jabatan, yaitu wali hakim. Akan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Wali yang mempunyai urutan dekat dan jauh tidak ada sama sekali

¹⁴¹ Indah Purbasari, *Op. Cit.* h. 93.

¹⁴² Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit.* h. 249.

¹⁴³ Ahmad Rofiq, *Op. Cit.* h. 68.

- 2) Wali yang mempunyai urutan dekat dan jauh ada, tetapi menjadi calon mempelai pria, sementara wali nikah yang sederajat dengannya (sama-sama anak paman) sudah tidak ada.
- 3) Wali nikah yang mempunyai urutan dekat ada, tetapi sementara melakukan ihram (ibadah haji)
- 4) Wali nikah yang mempunyai urutan dekat ada, tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya.
- 5) Wali nikah yang mempunyai urutan dekat ada, tetapi menderita penyakit yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas perwaliannya
- 6) Wali nikah yang mempunyai urutan dekat ada, tetapi sementara menjalani hukuman penjara yang tidak dapat dijumpai
- 7) Wali nikah yang mempunyai urutan dekat ada, tetapi bepergian jauh sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qashar
- 8) Wali nikah yang mempunyai urutan dekat ada, tetapi menolak untuk mengawinkan (*adlal*)
- 9) Calon mempelai wanita menderita sakit gila, sementara wali mujbirnya (ayah atau kakeknya) sudah tidak ada lagi.¹⁴⁴

Wali hakim tidak berhak menikahkan wanita yang belum *baligh*, kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak *sekufu*, tanpa seizin wanita yang akan menikah, dan di luar daerah kekuasaannya.¹⁴⁵

¹⁴⁴ Zainuddin Ali, *Op. Cit.* h. 18

¹⁴⁵ Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit.* h. 250.

c. Wali *Tahkim*

Wali *tahkim* yaitu, wali yang diangkat oleh calon suami atau calon istri. Adapun cara pengangkatannya (cara *tahkim*) adalah, calon suami mengucapkan *tahkim*, kepada calon istri dengan kalimat, “*Saya angkat Bapak atau Saudara untuk menikahkan saya pada (calon istri) dengan mahar dan putusan Bapak atau Saudara saya terima dengan senang*”. Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, “*Saya terima tahkim ini*”.¹⁴⁶ Wali *tahkim* terjadi apabila:

- 1) Wali *nasab* tidak ada
- 2) Wali *nasab ghaib*, atau bepergian sejauh dua hari perjalanan, serta tidak ada wakilnya
- 3) Tidak ada qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR).¹⁴⁷

d. Wali *Maula*

Wali *maula* yaitu, wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan disini yang dimaksud terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya. Imam Malik berkata bahwa jika seorang janda berkata kepada walinya agar menikahkan dirinya dengan lelaki yang disukainya, lalu ia menikahkan dengan dirinya sendiri atau lelaki lain yang

93. ¹⁴⁶ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h.

¹⁴⁷ Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit.* h. 250.

dipilih oleh perempuan yang bersangkutan, nikahnya sudah sah walaupun calon suaminya belum begitu dikenalnya.¹⁴⁸

Menurut Imam Syafi'i yang menikahkannya harus wali hakim atau walinya yang lain, baik setingkat dengan dia atau lebih jauh. Sebab wali termasuk syarat sahnya pernikahan. Oleh Karena itu, tidak boleh menikahkan diri sendiri sebagaimana penjual yang tidak boleh membeli barangnya sendiri. Dalam surat An-Nur ayat 32 dijelaskan:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.¹⁴⁹

Dengan demikian, Allah tidak melarang mereka yang menikahkan budak perempuan untuk dirinya sendiri atas dasar suka sama suka dan saling merelakan diantara keduanya.¹⁵⁰

e. Wali *Mujbir* dan Wali *Adol*

Wali *Mujbir* atau wali *adol* adalah wali bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, perempuan yang belum mencapai umur *mumayyiz*, termasuk di dalamnya perempuan yang masih gadis,

¹⁴⁸ Slamet Abidin, Aminuddin, *Loc. Cit.*

¹⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 494.

¹⁵⁰ Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit.* h. 252.

maka boleh dilakukan wali mujbir atas dirinya. Berlakunya wali *mujbir*, yaitu seorang wali menikahkan perempuan yang diwakilkan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat rida atau tidaknya.¹⁵¹

Adanya wali *mujbir* itu karena memerhatikan kepentingan orang yang diwalikan sebab orang tersebut kehilangan kemampuan, sehingga ia tidak mampu dan tidak dapat memikirkan kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri. Disamping itu ia belum dapat menggunakan akalnyanya untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya. Adapun yang dimaksud dengan *ijbar (mujbir)* adalah hak seorang ayah (ke atas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu.¹⁵² Syarat-syarat nya sebagai berikut:

- 1) Tidak ada permusuhan antara wali dengan perempuan menjadi wilayah (calon pengantin wanita)
- 2) Calon suaminya *sekufu* dengan calon istri, atau yang lebih tinggi
- 3) Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah.¹⁵³

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hak *ijbar* menjadi gugur. Sebenarnya *ijbar* bukan harus diartikan paksaan, tetapi lebih cocok bila diartikan pengarahannya. Wali yang tidak *mujbir* adalah sebagai berikut:

¹⁵¹ Slamet Abidin, Aminuddin, *Op. Cit.* h. 95.

¹⁵² Beni Ahmad Saebani, *Loc. Cit.*

¹⁵³ Mahmud Yunus, *Op. Cit.* h. 65.

- 1) Wali selain ayah, kakek dan terus keatas.
- 2) Wilayatnya terhadap wanita-wanita yang sudah *balig*, dan mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.
- 3) Bila calon pengantin wanitanya janda, maka izinya harus jelas baim secara lisan atau tulisan.
- 4) Bila calon pengantin wanitanya gadis, maka cukup dengan diam.¹⁵⁴

Apabila wali itu tidak mau menikahkan wanita yang sudah *baligh*, yang akan menikah dengan seorang pria yang *kufu'*, maka dinamakan wali *adol*. Apabila terjadi seperti itu, maka perwalian langsung pindah kepada wali hakim bukan kepada wali *ab'ad*, karena *adol* adalah zalim, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim. Tapi jika *adolnya* sampai tiga kali, berarti dosa besar dan *fasiq* maka perwaliannya pindah ke wali *ab'ad*. Kalau *adolnya* itu karena sebab nyata yang dibenarkan, tidak disebut *adol*, seperti wanita menikah dengan pria yang tidak sepadan atau menikah dengan maharnya di bawah mitsil, atau wanita dipinang oleh pria lain yang lebih sepadan dari peminang pertama.¹⁵⁵

D. Pengertian Nasab

Kata nasab secara etimologi dari bahasa Arab, yaitu نَسَبٌ - يَنْسِبُ - نَسَبًا, yaitu apabila terdapat kalimat وَذَكَرَ نَسَبَهُ نَسَبَ الرَّجُلُ berarti memberikan ciri-ciri dan menyebutkan keturunannya. Kata nasab adalah bentuk tunggal yang bentuk jamaknya bisa nisab, seperti kata سَدْرَةٌ menjadi سَدْرٌ dan bisa

¹⁵⁴ Slamet Abidin, Aminuddin, *Op. Cit.* h. 96.

¹⁵⁵ Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit.* h. 253.

juga nasab, seperti kata **عُرِفَ** menjadi **عُرْفَةً**.¹⁵⁶ Kata nasab disebutkan juga dalam Surah Al-Furqan (25) ayat 54 sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۚ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

Artinya: “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”.¹⁵⁷

Nasab atau keturunan artinya pertalian atau perhubungan yang menentukan asal-usul seorang manusia dalam pertalian darahnya. Di syariatkan pernikahan adalah untuk menentukan keturunan menurut Islam agar anak yang lahir dengan jalan pernikahan yang sah memiliki status yang jelas. Tetapi, kalau anak itu lahir diluar pernikahan yang sah, maka anak itu statusnya menjadi tidak jelas hanya mempunyai ibu, tetapi tidak mempunyai bapak.¹⁵⁸

Nasab adalah pertalian darah yang juga secara genetis akan membentuk pola rupa secara *enkulturatif*, artinya bahwa seorang anak dilihat secara fisik akan menyerupai ibu atau bapaknya, nenek atau kakeknya, demikian seterusnya. Secara *antropologis*, nasab atau keturunan merupakan hukum awal dari semua akibat terciptanya hukum yang lain, misalnya adanya mahram dalam perkawinan, adanya hak saling mewarisi, dan sebagainya. Dalam konteks perkawinan, perkawinan itu sendiri merupakan bagian penting dari

¹⁵⁶ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 22.

¹⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Diponogoro: Al-Aliy, 2006), h. 291.

¹⁵⁸ Slamet Abidin, Aminuddin, *Op. Cit.* h. 157.

terciptanya hukum kekerabatan.¹⁵⁹

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kata nasab secara bahasa berarti keturunan atau kerabat. Nasab telah menjadi bahasa Indonesia dan telah masuk dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* itu diartikan sebagai keturunan (terutama dari pihak bapak) atau pertalian keluarga. Hampir sama dengan definisi terakhir ini, dalam *Ensiklopedia Islam*, nasab diartikan sebagai keturunan atau kerabat, yaitu pertalian keluarga melalui akad nikah perkawinan yang sah.¹⁶⁰

1. Anak Sah dan Akibat Hukumnya

Anak sah diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan. Menurut ketentuan pasal tersebut, ada dua golongan anak sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam perkawinan dan ada dua kemungkinan yaitu sebagai berikut:

- a. Setelah perkawinan dilangsungkan, istri baru hamil kemudian setelah kandungannya berumur 9 bulan 10 hari, istri melahirkan anak.
- b. Sebelum perkawinan dilangsungkan, istri sudah hamil leboh dulu. Setelah dilangsungkan perkawinan, istri melahirkan anak.¹⁶¹

Anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan, dalam hal ini istri hamil setelah perkawinan dilangsungkan. Kemudian, terjadi perceraian atau kematian suami. Setelah terjadi peristiwa tersebut, istri baru melahirkan anak.

¹⁵⁹ Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit.* h. 173.

¹⁶⁰ M. Nurul Irfan, *Op. Cit.* h. 24.

¹⁶¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), h. 102.

Akibat hukum dari kelahiran anak sah ini adalah timbul hubungan hukum antara orang tua dan anak. Dalam hubungan hukum tersebut, orang tua mempunyai hak dan kewajiban terhadap anaknya, dan sebaliknya anak mempunyai hak dan kewajiban terhadap orang tua. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak lazim disebut “kekuasaan orang tua”.¹⁶²

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Kemudian dalam Pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dan dibuat selama perkawinan. Jadi, anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan melekat padanya serta berhak untuk memakai nama di belakang namanya untuk menunjukkan keturunan dan asal usulnya.¹⁶³

BW mengenal anak sah yaitu, anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, anak luar kawin yang diakui dan anak luar kawin yang disahkan. Pengakuan merupakan perbuatan untuk meletakkan hubungan hukum antara anak dan orang tua yang mengakuinya. Pengesahan hanya terjadi dengan perkawinan orang tuanya, yang telah mengakuinya lebih dahulu atau mengakuinya pada saat perkawinan berlangsung.¹⁶⁴

¹⁶² *Ibid*, h. 103.

¹⁶³ Abdul Manan, *Op. Cit.* h. 78.

¹⁶⁴ Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), h. 19.

2. Anak tidak Sah dan Akibat Hukumnya

Anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian, anak tidak sah hanya berhak mewaris dari ibunya dan keluarga ibunya.¹⁶⁵

Perkawinan yang menurut hukum dianggap tidak sah umpamanya, maka anak yang lahir dari perkawinan itu akan merupakan anak yang tidak sah.¹⁶⁶ Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat 1). Dengan penjelasan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang lain.¹⁶⁷

Anak hasil zina hanya dihubungkan secara genetis kepada ibunya, karena ibunya yang mengandung dan melahirkan, meskipun ayahnya ada, perkawinan yang dilakukan tanpa akad yang benar atau bertentangan dengan syariat Islam atau dalam bahasa lain karena hasil perzinaan. Oleh Karena itu, anak baru dianggap sah secara yuridis formal, jika ia

¹⁶⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.* h. 103.

¹⁶⁶ Wantjik Saleh, *Op. Cit.* h. 15

¹⁶⁷ *Ibid*, h. 16.

dilahirkan dari suami istri yang menikah dengan akad yang benar.¹⁶⁸

Menurut Al-Jaziri, sebagaimana yang dikutip dari Abdul Manan jika perkawinan yang telah dilaksanakan oleh seorang tidak sah karena kekhilafan dan ketidaktahuan atau tidak sengaja dan belum terjadi persetubuhan, maka perkawinan tersebut harus dibatalkan, yang melakukan perkawinan itu dipandang tidak berdosa, jika telah terjadi persetubuhan maka itu dipandang sebagai *wathi' syubhat*, tidak dipandang sebagai perzinahan, yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi zina, istri diharuskan ber-iddah apabila pernikahan telah dibatalkan, anak yang dilahirkan dari perkawinan itu dipandang bukan sebagai anak zina dan nasabnya tetap dipertalikan kepada ayah dan ibunya. Tetapi jika perkawinan yang dilakukan oleh seorang sehingga perkawinan itu menjadi tidak sah karena sengaja melakukan kesalahan memberikan keterangan palsu, persaksian palsu, surat-surat palsu atau hal-hal lain yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perkawinan yang demikian itu wajib dibatalkan. Jika perkawinan yang dilaksanakan itu belum terjadi persetubuhan, istri tersebut tidak wajib beriddah, orang melaksanakan perkawinan itu dipandang bersalah dan berdosa,¹⁶⁹ dapat dikenakan tuntutan pidana, persetubuhan itu dipandang sebagai perzinahan dan dikenakan had, nasab anak yang dilahirkan tidak dapat dipertalikan kepada ayahnya, hanya dipertalikan kepada ibunya.¹⁷⁰

¹⁶⁸ Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit.* h. 175.

¹⁶⁹ Abdul Manan, *Op. Cit.* h. 42.

¹⁷⁰ *Ibid*, h. 43.

BAB III

WALI PALSU

A. Pengertian Wali Palsu

Wali palsu adalah wali dalam pernikahan seseorang tetapi bukan wali yang sebenarnya sama halnya dengan wali yang tidak sah untuk melakukan rukun nikah. Maksud dari wali palsu ini seperti pernikahan ini dilakukan dengan pemalsuan identitas wali seperti meminta orang lain yang menjadi wali nasabnya padahal wali yang sebenarnya tidak tahu, dan bisa juga seperti pernikahan dilakukan dengan persetujuan wali nasab kepada wali hakim padahal wali nasab tidak membuat surat kuasa wali tersebut, tetapi surat kuasa wali tersebut ada dan diberikan kepada wali hakim, maka sudah jelas berrati surat kuasa tersebut sudah dipalsukan oleh orang yang akan melakukan pernikahan tersebut, maka pernikahan itu tidak sah karena dinikahkan dengan wali yang tidak berhak. Status wali berperan penting dalam pernikahan apabila tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat dari perkawinan apalagi dalam hal wali maka pernikahan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan. Oleh karena itu hubungan orang tua dan anak harus terjaga dengan baik, oleh sebab itu dalam pernikahan harus dengan perantara orang tua dan persetujuan orang tuanya agar pernikahan tersebut terbentuk rumah tangga yang baik.¹⁷¹

¹⁷¹ Sri Turatmiyah, "Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", Simbur Cahaya, Vol. XXII No. 56 (Januari 2015).

B. Contoh-Contoh Kasus Wali Palsu

Wali palsu dalam perkawinan merupakan wali yang tidak sah karena ia melakukan pernikahan tersebut dengan memalsukan identitas seperti:

1. Seperti dalam Putusan No 132/Pdt.G/2012/PA.Plg. terdapat perkara permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Abdullah bin Abdurrahman kepada Muhammad Reza Vahlevi dan Fitri binti Abdullah bahwa Muhammad Reza Vahlevi telah menikahi Fitri pada tanggal 24 Juli 2011. Bahwa di dalam buku nikah tersebut dicantumkan wali nikah adalah Abdullah yaitu selaku pemohon pembatalan perkawinan ini, sementara pemohon tidak pernah merasa bahwa telah menikahkan Muhammad Reza Vahlevi dan Fitri, dan pada tanggal 3 Agustus 2012 telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Nabila. Pemohon yaitu selaku ayah dari Fitri baru mengetahui adanya pernikahan tersebut pada tanggal 15 Agustus 2012 pada saat pemohon mencari Fitri di rumah sakit yang tengah mengurus bayinya, dan kemudian datanglah Termohon I menunjukkan surat nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pemulutan kabupaten Ogan Ilir, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang di dalamnya tercantum data palsu yaitu menuliskan nama Pemohon sebagai wali nikahnya, sementara Pemohon tidak tahu adanya pernikahan tersebut. Pemohon telah merasa dibohongi oleh Termohon I dan Termohon II yang meminta kepada petugas untuk menikahkan Termohon I dan Termohon II, yaitu dengan membuat pemalsuan data mengenai wali nikah yang menyebutkan bahwa wali nikahnya adalah wali

nasab atau ayah kandung, sementara Pemohon sebagai ayah kandung yang seharusnya menjadi wali pernikahan tersebut tidak pernah diberitahukan ataupun dihubungi untuk menikahkan anaknya tersebut. Karena itulah disebut dengan wali palsu bukan wali sebenarnya. Pernikahan ini telah melanggar Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena pernikahan tersebut telah menggunakan data yang palsu mengenai wali nikahnya.¹⁷²

2. Perkawinan yang dibatalkan karena pemalsuan data pun terjadi pada kasus pernikahan oleh wali hakim tanpa persetujuan dari wali nasab seperti dalam putusan Nomor: 32/Pdt.G/2013/PA.Psp yaitu pemohon selaku ibu dari termohon II mengajukan pembatalan perkawinan karena pernikahan itu tidak sah yaitu menggunakan wali yang bukan haknya. Ayah dari termohon II dan kakeknya sudah meninggal dunia. Termohon I dan II telah melakukan perkawinan dengan wali nikahnya adalah turut termohon sebagai wali hakim, yang menerima kuasa dari wali nikah yang paling berhak yaitu saudara laki-laki kandung paling tua. Karena ayah termohon II telah meninggal dunia dan kakek kandung dari pihak ayah telah meninggal dunia maka wali yang paling berhak adalah saudara laki-laki kandung paling tua termohon II sehingga yang mestinya menjadi wali nikah termohon II dengan termohon I. Tetapi berdasarkan Akta Nikah Nomor 07/007/1/2013 Kantor Lirusin Agamer Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu Tahun 2013 ditemukan fakta bahwa

¹⁷² <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/> didownload pada (12 Mei 2018).

(wali nikah termohon II yang paling berhak) memberikan kuasa kepada kepada wali hakim/ KUA (tanpa menyebutkan KUA yang mana) sebagai wali pernikahan Termohon II untuk menikah dengan Termohon I, sementara kakak kandung tidak pernah memberikan kuasa hak menjadi wali nikah Termohon II kepada siapapun, disamping itu penerima kuasa yang disebutkan di dalam surat kuasa wali tersebut pun tidak menyebutkan KUA Kecamatan mana dan Kabupaten mana, hal mana KUA kecamatan itu minimal ratusan jumlahnya diseluruh Indonesia. Dengan status surat kuasa sekualitas itu tidak terpenuhi diantara surat kuasa, turun termohon bertindak sebagai wali nikah Termohon I dan II dalam kapasitasnya sebagai wali hakim, oleh karena itu maka surat kuasa wali tersebut harus dinyatakan tidak sah. Bahwa berdasarkan peristiwa dan fakta tersebut maka akad pernikahn Termohon I dan II tidak sah dalam perspektif hukum Islam yang berlaku di Indonesia karena wali nikahnya adalah wali yang tidak berhak. Sehingga pernikahan harus dibatalkan.¹⁷³

3. Pernikahan yang dilaksanakan dengan wali *ab'ad* padahal wali *aqrab* masih ada, sehingga orang yang akan melakukan pernikahan ini memalsukan identitasnya bahwa yang menikahkan adalah wali *aqrab*nya padahal jelas-jelas yang menikahkan adalah sepupunya atau wali *ab'ad*. Maka pernikahan ini tidak sah karena menggunakan wali yang bukan haknya.

¹⁷³ [http: //putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/](http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/) didownload pada (12 Mei 2018).

C. Akibat Perkawinan Wali Palsu

Akibat perkawinan wali palsu ini adalah perkawinan tersebut tidak sah karena tidak menggunakan wali yang berhak. Dalam pasal 2 ayat 1 undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.¹⁷⁴ Keberadaan wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi, maka untuk menjadi wali nikah itu selain muslim dan akil balig, wali juga harus mempunyai hak untuk menikahkan, karena apabila tidak mempunyai hak untuk menikahkan maka pernikahan tersebut tidak sah dan yang dimaksud dengan wali palsu ini adalah wali yang tidak mempunyai hak untuk menikahkan karena identitas wali ini telah dipalsukan sehingga sudah jelas apabila identitas wali sudah dipalsukan maka wali itu tidak sah karena bukan menggunakan wali yang sebenarnya.

Dalam agama Islam wali nikah di bagi menjadi dua yaitu wali nasab yang perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah seperti orang tua kandung, dan bisa juga wali aqrab dan ab'ad (saudara terdekat atau yang jauh). Wali hakim yaitu wali yang hak perwaliannya timbul karena orantua mempelai perempuan menolak atau tidak ada. Maka dalam agama Islam kita harus berhubungan baik dengan keluarga terutama kepada orangtua karena orang tualah yang akan menikahkan tidak adanya peran orangtua maka pernikahan itu tidak sah.¹⁷⁵ Apabila terdapat perkawinan yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syaratnya maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

¹⁷⁴ Neng Djubaidah, *Op. Cit.* h. 107.

¹⁷⁵ Ahmad Rofiq, *Op. Cit.* h. 66.

Karena dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatatan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, dan tidak dihadiri dua orang saksi maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan.¹⁷⁶ Karena perkawinan ini dilakukan dengan wali palsu maka sudah jelas bahwa perkawinan ini dapat dibatalkan dan terdapat akibat yaitu status anak. Status anak dalam hukum Islam dan hukum positif berbeda yaitu dalam hukum Islam anak dari perkawinan yang dibatalkan karena wali palsu ini tidak sah yaitu status nasabnya hanya kepada ibunya saja berbeda dengan hukum positif yaitu status anak tersebut terdapat anak sah yaitu bernasab kepada ayah dan ibunya.¹⁷⁷



¹⁷⁶ Tihami, Sohari Sahrani, *Op. Cit.* h. 203.

¹⁷⁷ Abdukadir Muhammad, *Op. Cit.* h. 112.

BAB IV

ANALISIS

A. Konsep Status Anak dalam Perkawinan yang Dibatalkan Karena Wali Palsu

Konsep status anak menurut hukum Islam yang dibatalkan karena wali palsu ini termasuk anak yang tidak sah karena ia menggunakan wali palsu atau wali yang tidak sah, seperti dalam kasus yang penulis teliti ini bahwa termohon I telah melakukan pernikahan dengan termohon II tetapi diwalikan kepada orang lain padahal ayah dari termohon I masih hidup. Agama Islam sangat menganjurkan untuk berhubungan baik dengan orang tua terutama masalah perkawinan, harus meminta persetujuan dahulu dari kedua orang tua, karena orang tua lah yang akan menjadi wali dalam pernikahan apalagi mewalikan pada calon mempelai wanita. Seperti dalam hadis berikut:

لَا تَنْكِحُ الْمَرْأَةَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَوْ السُّلْطَانِ. (احديث)

Artinya: “Wanita tidak boleh menikah, kecuali dengan izin walinya, atau orang cerdas dari kalangan keluarganya, atau penguasa”. (Al-Hadis)¹⁷⁸

Wali harus ada dalam melaksanakan akad nikahnya atau mengizinkan wanita itu untuk mewakili kepada laki-laki yang dipercaya untuk menikahkannya. Dan jika ia mewakili kepada orang lain tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal. Imam Syafi’i berpendapat bahwa seseorang

¹⁷⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul ‘I-Mujtahid*, diterjemahkan oleh, Abdurrahman, Haris Abdullah dengan judul *Tarjamah Bidayatul ‘I-Mujtahid* (Semarang: CV Asy Syifa’, 1990), h. 375.

tidak boleh mengawinkan seorang gadis atau janda manakala ayahnya ada. Pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali dinikahkan oleh wali *aqrab* (dekat), dan apabila tidak ada oleh wali *ab'ad* (jauh), dan jika tidak ada maka dinikahkan oleh penguasa (wali hakim). Pada saat pemohon mengetahui pernikahan termohon I tersebut pemohon langsung membatalkan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama. Akibat hukum yang terdapat dalam masalah ini adalah tentang status anak, pernikahan ini tidak mengikuti hukum masing-masing agamanya maka pernikahan ini dianggap tidak sah dan anak nya pun termasuk anak yang tidak sah maka pertalian nasab hanya kepada ibu nya saja.

Konsep hukum positif mengatakan seperti dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Anak-anak yang lahir dari perkawinan itu adalah anak-anak mereka berdua dan dinyatakan sebagai anak sah.

B. Persamaan dan Perbedaan Status Anak dalam Perkawinan yang Dibatalkan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif

Pembatalan perkawinan disebut dengan fasakh dalam hukum Islam yaitu bisa terjadi karena rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama. Pembatalan perkawinan menurut hukum positif adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah. Terdapat persamaan dalam perkawinan yang dibatalkan karena

wali palsu yaitu sama-sama anak yang dilahirkan dari orang tua yang pernikahannya dibatalkan karena wali palsu. Wali palsu ini termasuk dengan wali yang tidak sah karena diwalikan oleh orang lain atau tidak senasab. Agama Islam mengajarkan bahwa hubungan antara anak dengan orang tuanya harus terjaga baik, oleh sebab itu bila seorang anak perempuan hendak menikah dengan seorang laki-laki, haruslah dengan perantara orang tuanya apabila masih hidup atau yang disebut dengan wali *aqrab* (dekat), apabila tidak ada oleh wali *ab'ad* (jauh), dan jika tidak ada maka dinikahkan oleh penguasa (wali hakim). Begitupun dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 20 dinyatakan:

1. Bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim, *akil* dan *balig*
2. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

Penulis setuju bahwasannya dalam pernikahan harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ada seperti rukun dan syarat yang harus dipenuhi, karena apabila ada salah satu rukun tidak terpenuhi maka pernikahan itu dapat batal. Izin orang tua juga berperan penting dalam pelaksanaan pernikahan karena yang akan menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali *aqrab* (dekat) apabila tidak ada wali dekat dengan wali *ab'ad* (jauh) dan jika tidak ada maka dinikahkan oleh wali hakim. Apabila pernikahan tidak dilakukan sesuai aturan yang berlaku maka dapat dibatalkan perkawinannya atau yang disebut dengan pembatalan perkawinan. Perkawinan yang dibatalkan ini menimbulkan akibat hukumnya yaitu terhadap status anak, Status anak dalam hukum Islam dan

hukum positif ini berbeda seperti.

Pertama, dalam hukum Islam, Imam Syafi'I mengatakan seperti dalam hadis bahwa:

لَا تَنْكِحُ الْمَرْأَةَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَوْ السُّلْطَانِ. (احديث)

Artinya: :“Wanita tidak boleh menikah, kecuali dengan izin walinya, atau orang cerdas dari kalangan keluarganya, atau penguasa”.(Al-Hadis)¹⁷⁹

Karena dalam Islam juga wali nikah ini dibagi menjadi dua yaitu wali nasab yang perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah seperti orang tua kandungnya, dan bisa juga wali *aqrab* dan *ab'ad* (saudara terdekat atau yang jauh). Wali hakim yaitu wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua mempelai perempuan menolak atau tidak ada. Pernikahan yang sah memiliki status yang jelas, Apabila anak itu lahir diluar pernikahan yang sah, maka anak itu statusnya menjadi tidak jelas hanya mempunyai ibu, tetapi tidak mempunyai bapak. Anak akan disebut sah apabila pernikahan itu sah, tetapi dalam masalah yang penulis teliti ini bahwa Termohon I dinikahkan oleh orang lain padahal ayah termohon I masih hidup. Maka pernikahan ini disebut batal dan anak yang lahir dari pernikahan yang sengaja memberikan keterangan palsu ini wajib dibatalkan dan nasab anak yang lahir tidak dapat dipertalikan kepada ayahnya tetapi hanya pada ibunya.

Kedua, Hukum positif menyatakan tentang status anak di dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 28 ayat (2) dinyatakan keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan

¹⁷⁹ *Ibid*, h. 375.

tersebut karena untuk melindungi kemaslahatan dan kepentingan hukum serta masa depan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang akan dibatalkan oleh pengadilan agama, sehingga kekeliruan orang tua tidak dapat dilimpahkan kepada anak-anaknya. Menurut hukum positif anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan ini nasabnya masih kepada kedua orang tuanya dan dinyatakan sebagai anak sah.

Menurut Penulis tentang status anak dari perkawinan yang dibatalkan karena wali palsu adalah anak yang tidak sah karena penulis setuju dengan Imam Syafi'i bahwasannya dalam pernikahan kita harus meminta izin dahulu kepada orang tua karena dalam agama Islam hubungan anak dengan orang tua harus baik oleh sebab itu apabila seorang wanita ingin menikah harus meminta izin dahulu kepada orang tua karena orang tua lah yang akan menjadi wali dalam pernikahan apabila ayah masih hidup apabila ayah sudah tidak ada maka bisa dengan wali *ab'ad* atau wali jauh. Jika pernikahan dapat dilakukan tanpa izin orang tua, maka akan lebih banyak pernikahan yang menggunakan wali yang tidak senasab dan anak-anak dibawah umur juga dapat langsung menikah tanpa berpikir harus meminta izin kepada orang tua, dan apabila itu terjadi akan lebih banyak pula orang yang bercerai dalam pernikahan yang masih seumur jagung karena mereka menganggap bahwa syarat pernikahan itu tidak mesti meminta restu dari orang tuanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah disusun lakukan terkait tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap status anak dalam perkawinan yang dibatalkan karena wali palsu maka penyusun memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep status anak dalam hukum Islam, perkawinan yang dibatalkan karena wali palsu adalah anak tidak sah karena ia dinikahkan oleh wali yang bukan nasabnya. Pernikahan yang tidak sah maka anaknya pun tidak sah, hanya bernasab kepada ibunya saja. Konsep status anak menurut hukum positif menyatakan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Anak-anak yang lahir dari perkawinan itu adalah anak-anak mereka berdua dan dinyatakan sebagai anak sah.
2. Persamaan status anak dalam dalam perkawinan yang dibatalkan ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif yaitu sama-sama anak yang dilahirkan dari orang tua yang pernikahannya dibatalkan karena wali palsu. Perbedaan dalam status anak dari perkawinan yang dibatalkan ini bahwa menurut hukum Islam merupakan anak yang tidak sah karena Imam Syafi'i mengatakan pernikahannya tidak sesuai dengan akad karena ia menjadikan seorang wali yang bukan haknya karena dalam hukum Islam orang yang berhak mewalikan terlebih dahulu adalah wali *aqrab* atau wali dekat seperti ayah, dan bila tidak ada wali dekat dengan wali

jauh atau wali *ab'ad* seperti kakak atau adik ayah, apabila tidak ada maka boleh dengan wali hakim. Berbeda dengan Status anak menurut hukum positif dalam pembatalan perkawinan ini tetap sah seperti di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 28 ayat (2) dinyatakan keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan

B. Saran

Setelah melakukan pengamatan dan penelitian yang mendalam tentang Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap status anak dalam perkawinan yang dibatalkan karena wali palsu, maka penyusun dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan yang penulis teliti bahwa perkawinan merupakan ibadah dan perintah dari Allah Swt, jadi aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam agamanya harus dipenuhi, apabila tidak dipenuhi maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan.
2. Apabila ingin melakukan perkawinan, bagi mempelai wanita harus ada wali nasab apabila masih ada, agar aturan-aturan dalam pernikahan dapat terpenuhi dan status anak menjadi jelas

DAFTAR PUSAKA

- A. Rasyid Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998.
- Abidin Slamet, Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Abidin Slamet, Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Abror Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2015.
- al-Asqalani Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh, Khalifaturrahman, Haer Haeruddin dengan judul *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Al-Habsyi Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan, 2002
- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Amin Ma'ruf, Nasaruddin Umar, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Amzah, 2013.
- Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam", *Al-'Adalah*, Vol. 12 No. 2 . 4 Desember 2015.
- Ayyub Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Diponogoro: Al-Aliy, 2005.
- Djubaidah Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ghozali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Irfan M, "Ambiguitas Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974: sebuah Bentuk Diskriminasi Hukum", *Al-'Adalah*, Vol. 10 No. 3. Januari 2012.

Irfan M. Nurul, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2013.

Irfan M. Nurul, “Kriminalisasi Poligami dan Nikah Siri”, *Al-‘Adalah*, Vol. 10 NO. 2. Juli 2011.

Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, 2004.

Nuruddin Amiur, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.

Purbasari Indah, *Hukum Islam sebagai Hukum Positif di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2017.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Ramulyo Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.

Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

Rohmat, “Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafa’iyah, Hanafiah, dan Praktiknya di Indonesia”, *Al-‘Adalah*, Vol.10 No.2. Juli 2011.

Rusyd Ibnu, *Bidayatul ‘I-Mujtahid*, diterjemahkan oleh, Abdurrahman, Haris Abdullah dengan judul *Tarjamah Bidayatul ‘I-Mujtahid*. Semarang: CV Asy Syifa’, 1990.

Sabiq Sayyid, *Fikih Sunah 7*. Bandung: PT Al Ma’Arif, 1994.

Saebani Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Saebani Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Saleh Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.

Sembiring Rosnidar, *Hukum Keluarga*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Soesito R., *Pokok-pokok Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*. Bogor: Politeta, 1984.

Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1993.

Summa Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005.

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

‘Uwaidah Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000.

Wagianto, “Kritik Sosiologi Hukum Islam terhadap Fakta Hukum Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Depok Jawa Barat”, *Al-‘Adalah*, Vol. 12 No. 2. Desember 2014.

Yunus Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990.

